

**TINJAUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
NEW SOUTHERN POLICY OLEH KOREA SELATAN**

SKRIPSI



Oleh:

Mohammad Izam Dwi Sukma

20323114

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023/2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Pengambilan Keputusan

***New Southern Policy* Oleh Korea Selatan**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
13 Februari 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
3. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A

Tanda Tangan

[Signature]
Karina
Hangga Fathana

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 06 Desember 2023



Mohammad Izam Dwi Sukma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR DIAGRAM	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II	
DETERMINAN POLITIK DALAM NEGERI	15
2.1 Kultur Politik di Korea Selatan	15
2.2 Pemengaruh Birokrat.....	18
2.3 Pemengaruh Kepentingan.....	20
2.4 Pemengaruh Partai.....	22
2.5 Pemengaruh Massa.....	27
BAB III	
DETERMINAN KONDISI EKONOMI & MILITER	32

3.1 Subdeterminan Ekonomi.....	32
3.2 Subdeterminan Militer	36
BAB IV	
DETERMINAN KONTEKS INTERNASIONAL	40
4.1 <i>Setting</i> Ekologis	40
4.2 Arus Manusia	48
4.3 Pola Interaksi Rutin.....	51
BAB V	
PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Rencana Implementasi dan Objektif <i>Eurasia Initiative</i>	3
Diagram 2. <i>Policy Tasks</i> Dalam NSP	5
Diagram 3. Pemetaan Determinan Yang Memengaruhi	11
Diagram 4. Faktor-Faktor Pemengaruh Pengambilan Keputusan NSP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kunjungan Presiden Korea Selatan	4
Gambar 2. Persentase Perolehan Kandidat Berdasarkan	24
Gambar 3. Persentase Perolehan Kandidat Berdasarkan	26
Gambar 4. Hasil Survei Preferensi Masyarakat Korea Selatan.....	28
Gambar 5. Hasil Survei Sifat Hubungan Korea Selatan	29
Gambar 6. Cuplikan Siaran <i>Upfront</i> Episode Ke-159	30
Gambar 7. Sebaran Rekan Perdagangan Senjata Korea Selatan 2011-2016	39
Gambar 8. Pemetaan Regionalisasi Asia-Pasifik & Indo-Pasifik	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Pendanaan AKCF 2016-2020	4
Tabel 2. Wewenang Presiden Korea Selatan	16
Tabel 3. Hasil Pilpres ke-19 di Korea Selatan dalam Persentase.....	23
Tabel 4. Hasil Perolehan Kursi Pemilu Majelis Nasional ke-20.....	24
Tabel 5. Polaritas Konservatif-Progresif di Korea Selatan	25
Tabel 6. Performa GDP & GNI Korea Selatan 2011-2016.....	32
Tabel 7. Rasio Perdagangan Terhadap GNI Korea Selatan	33
Tabel 8. Performa Perdagangan RoK-Tiongkok Periode 2011-2016	34
Tabel 9. Performa Perdagangan Korea Selatan.....	35
Tabel 10. Performa Perdagangan Korea Selatan.....	36
Tabel 11. Gambaran Jumlah Sistem Persenjataan Korea Selatan 2011-2016	37
Tabel 12. Gambaran Jumlah Sistem Persenjataan Korea Utara 2011-2016	38
Tabel 13. Perbandingan Jumlah Personel Militer Periode 2011-2016.....	38
Tabel 14. Jumlah Tanggungan Operasional Pertahanan	46
Tabel 15. Volume Mobilitas Masyarakat Asal ASEAN	49
Tabel 16. Volume Mobilitas Masyarakat Asal India	49
Tabel 17. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Korea Selatan	50

DAFTAR SINGKATAN

ACS	: ASEAN Committee in Seoul
AKCF	: ASEAN-Korea Cooperation Fund
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
CPRF	: Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland
DP	: Democratic Party of Korea
EPS	: <i>Employment Permit System</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
GSOMIA	: <i>General Security of Military Information Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GNI	: <i>Gross National Income</i>
HRD-K	: Human Resources Development Service of Korea
KBS	: Korea Broadcasting System
KCCI	: Korea Chamber of Commerce and Industry
KCS	: Korea Customs Service
KOSIS	: Korea Statistical Office
MBC	: Munhwa Broadcasting Corporation
NSP	: <i>New Southern Policy</i>
Pemilu	: Pemilihan umum
Pilpres	: Pemilihan umum presiden
RoK	: Republic of Korea
SBS	: Seoul Broadcasting System
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Area Defense</i>
USFK	: United States Forces Korea

ABSTRAK

Peralihan presidensi menuju Moon Jae-in menghadirkan kebijakan *New Southern Policy* sebagai kebijakan luar negeri Korea Selatan dengan target negara-negara Asia Tenggara dan India. Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini akan meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan *New Southern Policy* oleh Korea Selatan menggunakan teori *decision-making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin. Teori tersebut mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dalam tiga determinan utama, yaitu faktor politik dalam negeri, konteks internasional, dan kondisi ekonomi & militer sehingga timbul temuan-temuan, seperti peran kelompok Democratic Party of Korea, narasi regionalisasi Indo-Pasifik, hingga ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok berhadapan dengan aliansi militer dengan Amerika Serikat yang menjadikan *New Southern Policy* sebagai sarana mencapai kepentingan nasional Korea Selatan.

Kata kunci: Moon Jae-in, *New Southern Policy*, Kebijakan Luar Negeri, Korea Selatan, Pengambilan Keputusan

ABSTRACT

The transition of the presidency to Moon Jae-in presented the New Southern Policy as South Korea's foreign policy targeting Southeast Asian countries and India. Therefore, this qualitative research will review the factors that influence South Korea's New Southern Policy decision making using the decision-making theory developed by William D. Coplin. This theory identifies these factors in three main determinants, namely domestic political factors, international context, and economic & military conditions, resulting in findings, such as the role of the Democratic Party of Korea, the narrative of Indo-Pacific regionalization, and economic dependence on China while faced a military alliance with the United States which makes the New Southern Policy a means of achieving South Korean national interests.

Keywords: Moon Jae-in, *New Southern Policy*, Foreign Policy, South Korea, Decision making

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Korea, atau Republic of Korea (RoK) dapat pula disebut sebagai Korea Selatan, sebagai negara berdaulat memiliki tujuan dalam menyelenggarakan negara yang dalam studi hubungan internasional disebut sebagai kepentingan nasional. Nuechterlein (1976) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai keinginan & kebutuhan yang ingin dicapai oleh satu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lain yang mencakup lingkungan eksternal. Dalam mencapai hal tersebut, kebijakan luar negeri menjadi alatnya. Palmer and Morgan (2006) berargumen bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk seperti portofolio untuk mencapai tujuan di antara keberadaan tantangan-tantangan.

Gambaran kebijakan luar negeri besutan Presiden Park Geun-hye semasa menjadi kandidat presiden dapat dijelaskan melalui artikel terbitannya pada 2011 dengan judul “*the Korean Peninsula Trust Process*” dalam laman majalah *Foreign Affairs*. Narasi tersebut muncul sebagai resultan evaluasi sikap sangsi atau penuh curiga (*distrust*) antara Korea Utara dan Korea Selatan yang kian dalam pada era presidensi Lee Myung-bak ditandai oleh ketidakberlanjutan komunikasi dan pelanggaran perjanjian (N.-Y. Lee 2014) sehingga corak kebijakan ke depannya bertumpu pada membangun diplomasi kepercayaan (*trust-diplomacy*).

Ketika terpilih menjadi presiden pada 2013, kebijakan luar negeri Presiden Park Geun-hye termaktub dalam satu narasi besar *trustpolitik*. Narasi *trustpolitik* melingkupi beberapa visi kebijakan luar negeri masa itu, salah satunya *Eurasia Initiative* (S.-H. Lee 2014). *Eurasia Initiative* merangkumi variasi kebijakan Seoul

terhadap Rusia, Asia Tengah, Kaukasus Selatan yang menghubungkan Semenanjung Korea menuju kawasan Eropa-Asia dan integrasi perdamaian antar-Korea melalui kerja sama multilevel dengan aktor superbenua Eurasia (Tishehyar and Tuyserkani 2020). Secara objektif & rencana implementasi, beberapa sektor (konsep) kerja sama pembangunan berkuat pada konektivitas, ekonomi kreatif, & perdamaian, termasuk proyek transportasi berorientasi deeskalasi konflik melibatkan Korea Utara sebagaimana ditampilkan pada diagram 1.

Peralihan figur presiden kepada Moon Jae-in pada 2017 menimbulkan beberapa perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai aktivitas & keputusannya yang dapat diamati publik. Penulis menampilkan rangkuman kegiatan safari politik dan pertemuan bilateral dari Presiden Moon Jae-In ke kawasan Asia Tenggara dan India dalam gambar 1 yang dikutip dari James and Sanghwa (2020) disertai dengan perbandingan jumlah kunjungan presiden Korea Selatan sejak 2008 hingga 2019.

Jika dicoba buat perbandingan dengan era Presiden Lee Myung-Bak pada regional Asia Tenggara, Presiden Lee jelas terlihat tertinggal karena baru melakukan safari politiknya pada tahun keduanya. Selain itu, hal tersebut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan era Presiden Park Geun-Hye yang hanya melakukan 3 kunjungan. Hal ini menunjukkan prioritasasi kawasan Asia Tenggara dan India di bawah pemerintahan Moon Jae-in dibandingkan pada masa dua presiden sebelumnya.

Penulis juga menjumpai tren peningkatan jumlah program yang dibiayai oleh ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF) sejak 2016 sebagaimana dirangkum dari laman resmi AKCF pada tabel 1. Kenaikan ini diikuti dengan

surutnya jumlah program yang dibiayai sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Korea Selatan berusaha menekankan pada proyek-proyek yang memiliki nilai manfaat tertentu atau adanya prioritas bidang kegiatan kerja sama. AKCF melakukan berbagai program dengan orientasi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hingga mobilitas masyarakat antara kedua pihak sejak tahun 1990 (ASEAN-Korea Cooperation Fund, n.d.).

Diagram 1. Rencana Implementasi dan Objektif *Eurasia Initiative*



Sumber: Ministry of Foreign Affairs of South Korea (n.d.)

**Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kunjungan Presiden Korea Selatan
Selama Masa Jabatannya per 2008-2019**

Region	Lee					Park				Moon		
	Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 1	Yr 2	Yr 3
North America	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Northeast Asia	3	1	1	2	0	1	0	1	1	2	1	0
Southeast Asia	0	3	4	0	3	2	1	0	0	1	3	6
Europe	0	3	0	3	3	3	2	0	1	0	5	3
Middle East	0	1	0	1	4	0	0	4	1	0	1	0
Africa	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Oceania	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Central Asia	0	2	0	2	1	0	3	0	0	0	0	3
Latin America	1	0	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0
Total	5	13	6	12	13	7	7	10	7	4	12	13
	49					31				29		

Sumber: Kim and Sanghwa (2020)

Tabel 1. Profil Pendanaan AKCF 2016-2020

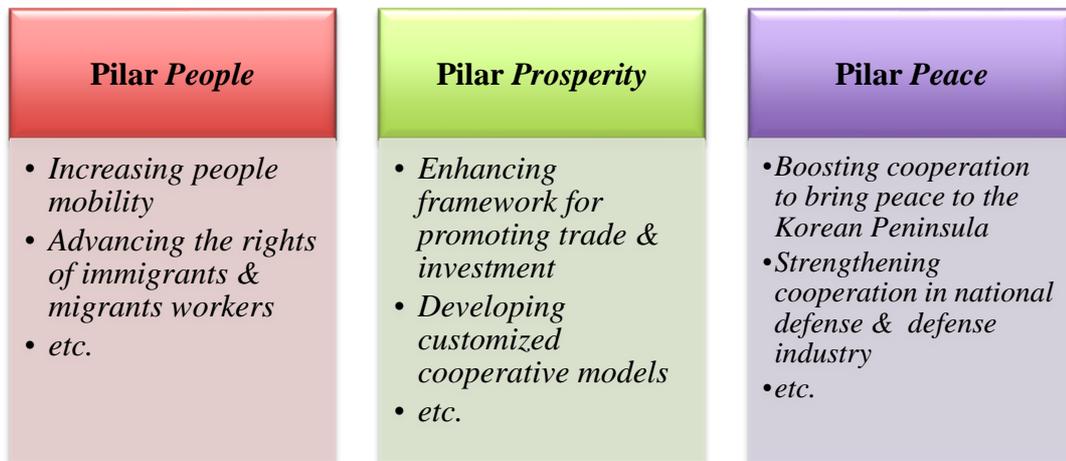
Tahun Pendanaan	Nominal	Jumlah Program
2016	\$2.050.000	16
2017	\$4.000.000	> 20
2018	\$5.960.000	10
2019	\$12.300.000	5
2020	\$16.250.000	9

Sumber: ASEAN-Korea Cooperation Fund (n.d.)

Penulis selanjutnya menemukan bahwasannya terdapat sebuah *umbrella strategy* dari Korea Selatan pada era Presiden Moon Jae-In dengan merilis beberapa kebijakan luar negeri masa itu, salah satunya adalah *New Southern Policy* (NSP). Kebijakan ini dirilis pada 09 November 2017 bersamaan dengan kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia (Son 2017) dan menargetkan negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) & India.

Presiden Moon menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bernadikan keinginannya untuk mentransformasikan fundamen kerja sama dari berbasis perdagangan kepada basis manusia (*people-centered*) sehingga memperkuat bidang-bidang yang sudah ada seperti pertukaran manusia, seni & budaya, hingga usaha pembangunan perdamaian regional. Kebijakan ini pula ditopang oleh tiga pilar P yang merepresentasikan bidang kerja sama, yaitu *People, Peace, and Prosperity* (Ok 2018) sebagaimana beberapa *policy task* ditampilkan pada diagram 2.

Diagram 2. Policy Tasks Dalam NSP



Sumber: Presidential Committee on New Southern Policy (2019)

Dengan demikian, penulis menemukan peralihan kebijakan luar negeri Korea Selatan dari berfokus pada superbenua Eurasia melalui *Eurasia Initiative* menuju ASEAN & India dalam *New Southern Policy* karena adanya kebaruan orientasi kebijakan yang dikehendaki oleh Korea Selatan. Selain itu, adanya kegiatan safari politik oleh Presiden Moon Jae-in memberikan sinyal adanya perilaku-perilaku prioritas terhadap negara-negara yang dikunjungi. Terakhir,

bantuan-bantuan yang diberikan melalui AKCF secara nominal naik dengan akumulasi kenaikan per 2011-2016 sebesar 14,2 juta dolar AS.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu meninjau lebih dalam menggunakan suatu pendekatan guna mengungkap faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan Korea Selatan pada era Presiden Moon Jae-In merilis *New Southern Policy*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari dinamika yang penulis ungkapkan di bagian latar belakang, penulis merumuskan suatu rumusan masalah berupa pertanyaan mengapa Korea Selatan mengambil keputusan untuk merilis *New Southern Policy* pada era Presiden Moon Jae-In?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis hendak mencapai beberapa tujuan melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan era Presiden Moon Jae-In;
2. Mengetahui faktor politik dalam negeri, faktor konteks internasional, dan kondisi ekonomi & militer di sekitar Korea Selatan yang memengaruhi pengambilan keputusan *New Southern Policy*

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan menelusuri faktor-faktor seputar proses pengambilan keputusan *New Southern Policy* oleh pemerintahan Korea Selatan pada kurun

waktu 2011 hingga Oktober 2017. Pada periode tersebut, negara-negara di dunia memunculkan cara pandang dan atau kebijakan geopolitik yang didominasi pada kawasan Asia-Pasifik hingga pada beberapa tahun terakhir berkembang terminologi Indo-Pasifik yang turut mendorong Korea Selatan menyusun strategi mengamankan kepentingannya.

Selain itu, kondisi dalam negeri Korea Selatan juga mendorong munculnya diskursus kebijakan luar negeri yang baru karena bersamaan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden ke-19 dan berusaha mengeluarkan diri dari ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok yang erat terjalin pada era presidensi sebelumnya. Cakupan penelitian berakhir pada bulan November 2017 bersamaan dengan perilisian *New Southern Policy* di Jakarta, Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian dan penulisan yang berusaha menginterpretasi kepentingan Korea Selatan dalam *New Southern Policy* bisa ditemukan. Salah satunya adalah penelitian berjudul *South Korea's Interest in ASEAN +1: New Southern Policy and Peacebuilding* karya Rahmadanu Pradityo. Pradityo mengemukakan bahwa dasar Korea Selatan merilis *New Southern Policy* adalah alasan kepentingan nasional. Penjabaran kepentingan nasional dilakukan dengan pendekatan mazhab Inggris (*English School*).

Kepentingan yang dikemukakan oleh Pradityo adalah sasaran peningkatan kerja sama ekonomi antara Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN dan peran mitranya tersebut dalam usaha *peacebuilding* di Semenanjung Korea Selatan. Penulis menyoroti nihilnya partisipasi kelompok birokrat dan tren pengembangan

kebijakan luar negeri berorientasi kawasan Indo-Pasifik sehingga daya eksplanasi menjadi kurang komprehensif.

Penelitian yang penulis evaluasi selanjutnya adalah berjudul *South Korea's ASEAN Policy Today: The New Southern Policy and Its Standing* karya Ratih Indraswari. Indraswari berargumen Korea Selatan mengusahakan *New Southern Policy* sebagai bagian dari diplomasi *middle power* yang mengutamakan penyebaran pengaruh melalui saluran non-militer. Selain itu, *New Southern Policy* dianggap sebagai respons atas perkembangan geopolitik yang memunculkan rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Penulis mengidentifikasi ketiadaan penjelasan peran kelompok birokrat dan aspirasi publik. Selain itu, pengaruh dari kecenderungan Partai Demokrat Korea Selatan dalam sikap politik luar negerinya juga tidak diulas di penelitian tersebut.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Choe Wongi dengan tajuk tulisan *Why South Korea Wants to Tie In with ASEAN*. Argumen utama dari Wongi dijelaskan pada tiga hal, yaitu pertama diversifikasi rekan aktivitas ekonomi, kedua aksi penyeimbangan diplomatik Korea Selatan, dan ketiga memperbaharui kerangka kebijakan dalam partisipasi membangun arsitektur regional. Namun, penulis kembali mendapati celah untuk mengungkap pengambilan keputusan *New Southern Policy* pada tulisan ini, yaitu peran politik domestik di dalam Korea Selatan. Aspirasi publik yang tercermin dalam survei publik dan peran kelompok birokrat tidak diuraikan oleh Wongi sehingga hal inilah yang akan penulis uraikan dalam bagian faktor politik dalam negeri.

Dengan demikian, beberapa penelitian sebelum ini telah mencapai tingkat penyelesaiannya masing-masing dalam menguraikan mengapa Korea Selatan

memutuskan merilis *New Southern Policy*. Namun, masing-masing penelitian itu pula memiliki kelemahan argumen seperti belum mencakupi opini publik mengenai hubungan Korea Selatan dengan AS dan Tiongkok, temuan partisipasi kelompok birokrat dalam menyusun & diseminasi kebijakan *New Southern Policy*, kecenderungan sikap politik luar negeri Partai Demokrat Korea Selatan sebagai partai asal Presiden Moon Jae-in.

Oleh karena itu, penulis dibantu teori *decision-making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin yang menghadirkan cara pandang yang lebih kompleks dalam menelusuri pengambilan kebijakan dengan memandang konteks internasional, faktor politik dalam negeri, dan faktor ekonomi & militer guna menyempurnakan penelitian eksisting dan menghadirkan unsur kebaruan dalam pembahasan fenomena.

1.6 Kerangka Pemikiran

William D. Coplin berusaha menguraikan beberapa faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan tindakan politik luar negeri dalam edisi kedua bukunya berjudul *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis* yang diterbitkan pada tahun 2003 dan versi bahasa Indonesianya dikaryakan oleh Drs. Marsedes Marbun.

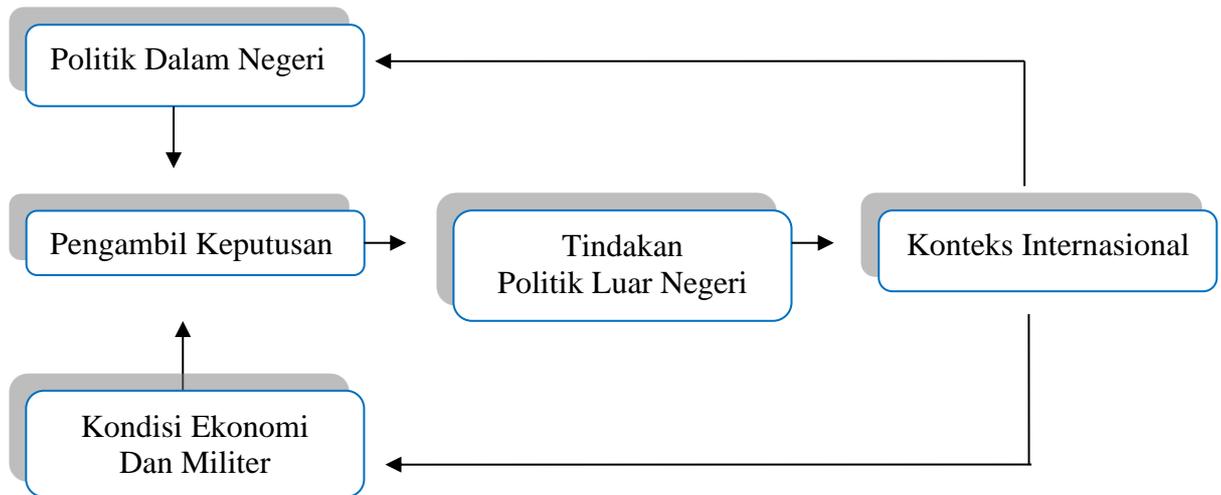
Pendekatan dalam buku tersebut akan membantu penulis menjelaskan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan oleh suatu negara. Determinan-determinan ini dibagi menjadi 3 payung besar dalam menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara, yaitu peran politik dalam negeri, konteks internasional, dan dampak kondisi ekonomi & militer suatu negara (Coplin 2003).

Determinan politik dalam negeri berusaha menguraikan peran aktor-aktor politik dalam negeri suatu negara dalam memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Coplin (2003) mengelompokkan aktor-aktor yang termasuk dalam determinan ini sebagai pemengaruh (*influencer*), yaitu kelompok partai, kelompok kepentingan, kelompok massa, dan kelompok birokrat.

Kemudian, konteks internasional ini merujuk pada sistem internasional dan hubungan antar-negara di dalam sistem itu yang turut memengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara sebagai sebuah aktor dalam hubungan internasional. Konteks internasional secara kaidah pendekatan ini dapat dielaborasi melalui penjelasan perihal geografis, ekonomis, dan politis dalam subdeterminan *setting* ekologis, arus manusia dan pola interaksi rutin antar-pejabat pemerintah yang berhubungan di sekitaran negara (Coplin, 2003).

Terakhir, kondisi ekonomi & militer suatu negara. Determinan ini lebih detailnya melingkupi dua subdeterminan, yaitu perihal ekonomi dan perihal militer. Subdeterminan ekonomi dijelaskan oleh Coplin (2003) merujuk pada kapasitas produksi ekonomi dan ketergantungan ekonomi negara tersebut terhadap perdagangan dan finansial internasional. Sedangkan, subdeterminan militer ini memayungi perihal kapasitas personel, tingkat pelatihan, perlengkapan angkatan bersenjata, hingga kemampuan dalam menjaga stabilitas dalam negerinya.

**Diagram 3. Pemetaan Determinan Yang Memengaruhi
Tindakan Politik Luar Negeri**



Sumber: Coplin (2003)

Dengan demikian, fitrah teori *decision-making* yang berusaha menguraikan pengambilan keputusan tindakan politik luar negeri suatu negara sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengungkap perilaku Korea Selatan melalui perilsan *New Southern Policy*.

1.7 Argumen Sementara

Penelusuran kembali musabab pengambilan keputusan *New Southern Policy* dapat dijelaskan menggunakan pendekatan *decision-making* yang dikembangkan oleh Coplin (2003) dengan menguraikan tiga determinan, yaitu konteks politik dalam negeri, konteks internasional, dan kondisi ekonomi & militer.

Pada determinan politik dalam negeri ini, penulis akan menguraikan peran empat kelompok pemengaruh, yaitu kelompok birokrat, kepentingan, partai, dan massa melalui analisis aktivitas masing-masing yang didahului dengan penjelasan konteks mengenai kultur politik Korea Selatan.

Selanjutnya, determinan konteks internasional dijelaskan melalui hubungan kemunculan *New Southern Policy* dengan berbagai cara pandang atau inisiatif dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Tiongkok dalam konteks regionalisasi Indo-Pasifik ataupun program pembangunan oleh negara sponsor pada umumnya. Selain itu, investasi jangka panjang terkait *peace-building* di kawasan Semenanjung Korea dan interaksi antara para pejabat pemerintahnya juga menjadi termasuk di bagian ini.

Terakhir, penulis berargumen bahwa ketergantungan perdagangan dengan Tiongkok menyebabkan keperluan bagi Korea Selatan untuk mendiversifikasi rekan dagangnya. Hal ini diikuti dengan kejadian sanksi ekonomi bersasar dari Tiongkok pada tahun 2016 saat instalasi *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) yang didukung oleh AS cukup menjadi amaran.

Selain itu, Korea Selatan juga terikat dengan AS sebagai salah satu sekutu utama dalam kerja sama militer yang membantu memberikan efek gentar dan perimbangan kekuatan terhadap Korea Utara. Hal lain pula yang perlu dipertimbangkan adalah volume perdagangan yang besar antara Korea Selatan dengan negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan India. Hal ini tercakup dalam determinan kondisi ekonomi dan militer.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis hendak menyelenggarakan penelitian yang dibantu dengan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (1992) dalam Rahmat (2009) memaparkan bahwa hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dari ucapan, tulisan, dan/perilaku subjek yang diamati. Oleh karena itu, kecocokan model kerja yang

ditawarkan metode penelitian kualitatif akan membantu penulis menguraikan fenomena bahasan pada penelitian kali ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian kali ini bertumpu pada negara Korea Selatan sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional dan objek penelitiannya adalah pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dari Korea Selatan bernama *New Southern Policy*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kali ini dilaksanakan dengan mengumpulkan lalu menganalisis data-data sekunder berupa artikel jurnal, artikel media massa, rekaman & cuplikan siaran media dalam media massa, dan dokumen pemerintah terpublikasi.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis mengawali rangkaian penelitian dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dengan membaca dan mengunduh buku, jurnal, ataupun laporan yang relevan dengan aktivitas Korea Selatan terkait kebijakan luar negerinya hingga secara spesifik pada penerbitan kebijakan *New Southern Policy*.

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis memilah data sesuai dengan kebutuhan pembuktian relevansi studi kasus dengan pilihan kerangka pemikiran. Pemilihan data yang dilakukan menuntun pada penyajian data dalam narasi yang dikelompokkan pada bab dan/ subbab tertentu serta berpotensi menyajikan data

dalam bentuk diagram & tabel. Terakhir, penulis membuat kesimpulan atas data-data yang dikelola dengan sifat sementara sehingga hipotesis yang dihasilkan akan divalidasi dengan data-data berikutnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian akan diuraikan ke dalam empat bab utama:

- Bab pertama akan berisi bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua akan berisi penjelasan konteks dan aktivitas yang berkaitan dengan determinan politik dalam negeri. Penulisan pula dilanjutkan dengan analisis substansi berdasarkan determinan.
- Bab ketiga akan berisi penjelasan konteks dan aktivitas yang berkaitan dengan determinan kondisi ekonomi & militer. Penulisan pula dilanjutkan dengan analisis substansi berdasarkan determinan.
- Bab keempat akan berisi penjelasan konteks dan aktivitas yang berkaitan dengan determinan konteks internasional. Penulisan pula dilanjutkan dengan analisis substansi berdasarkan determinan.
- Bab kelima akan mengakumulasi temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan menutup proses penulisan dengan kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini disebut pula sebagai penutup.

BAB II

DETERMINAN POLITIK DALAM NEGERI

Bab I telah memaparkan mengenai latar belakang hingga sistematika pembahasan yang menjadi fundamen dalam penelitian ini. Untuk melanjutkan pembahasan, bab II akan menjelaskan konteks substansial yang diikuti analisis berkaitan determinan politik dalam negeri. Penulisan pada bab II ini akan didahului mengenai penjelasan kultur politik di Korea Selatan sebagai dasar konteks potensi keterlibatan kelompok pemengaruh. Selanjutnya, penulisan diikuti penguraian subdeterminan pemengaruh kelompok birokrat, kepentingan, partai, dan massa.

2.1 Kultur Politik di Korea Selatan

Kultur politik akan memberikan gambaran mengenai bentang politik dan tata pemerintahan di Korea Selatan. Korea Selatan memberlakukan pemisahan kekuasaan trias politika, yaitu kelompok legislatif (*National Assembly* / Majelis Nasional), kelompok eksekutif yang terdiri atas presiden dan jajaran kabinet menteri & lembaga lainnya, dan kelompok yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung dan kelompok pengadilan di bawah kuasanya serta Mahkamah Konstitusi.

Pada era terkini, Korea Selatan sebagai negara berbentuk republik dan bersistem pemerintahan presidensial memiliki kekuasaan kelompok eksekutif yang amat kuat dikepalai oleh seorang presiden. Snyder (2018) mengakumulasi tendensi akademis tersebut dalam frasa “*imperial presidency*” karena kuasanya yang besar dalam menjalankan kuasa pemerintahan plus catatan sejarah era kepemimpinan otoriter militer pada masa awal kemerdekaan hingga pengaruh kepercayaan konfusianisme di Korea Selatan yang tidak hanya membekas pada sistem birokrasi

pemerintahan demokrasi modern, tetapi juga pada cara pandang masyarakat terhadap figur & institusi kepresidenan.

Terkait dengan kebijakan luar negeri, kuasa presiden di Korea Selatan untuk merumuskan dan mengeksekusi relatif tidak terkekang oleh perimbangan kuasa yang dimiliki oleh Majelis Nasional (Snyder 2018). Wewenang seorang Presiden Korea Selatan dijabarkan pada tabel 2 di bawah ini dan menunjukkan besarnya kuasa presiden dalam aktivitas berkaitan dengan kebijakan luar negeri di Korea Selatan.

Tabel 2. Wewenang Presiden Korea Selatan

Wewenang	Deskripsi
a. <i>Head of State</i>	1. Simbol kesatuan; dan 2. Perwakilan bangsa dalam sistem pemerintahan & urusan internasional
b. <i>Chief of Administrator</i>	1. Kepala pelaksana produk legislasi; 2. Kepala pelaksana kebijakan dengan membentuk kabinet
c. <i>Commander-in-chief</i>	1. Panglima tertinggi angkatan bersenjata
d. <i>Chief of Diplomat & Foreign-policy maker</i>	1. Mengutus & menerima perwakilan diplomatik; 2. Menandatangani perjanjian internasional
e. <i>Chief of Policy-maker & Key Lawmaker</i>	1. Mengusulkan rancangan undang-undang; 2. Mengemukakan pendapat kepada lembaga legislatif

Sumber: Office for Government Policy Coordination (n.d.)

Namun, G. Lee (2018) menjelaskan bahwa besarnya kuasa presiden juga dapat diimbangi oleh lembaga legislatif, terlebih pada pada tiga momen, yaitu era transisi menuju presiden yang baru, masa implementasi kebijakan, dan ketika keperluan ratifikasi perjanjian internasional.

Partai politik yang mengisi Majelis Nasional dapat berperan aktif pada era transisi menuju presiden yang baru karena pada 10 tahun terakhir, pemenang pemilihan presiden di Korea Selatan merupakan kandidat yang disponsori oleh partai politik. Pada momen transisi ini, partai politik akan berperan dalam menawarkan berbagai program-program sebagai bagian dari bahan kampanye mereka kepada masyarakat yang disusun bersama oleh beragam pemangku kepentingan, seperti rekan sebidang, kelompok ahli & akademisi, aktivis, mantan birokrat, dan para anggota partai (G. Lee 2018).

Selanjutnya, kelompok legislatif juga berperan dalam mengawasi dan pada tahap tertentu memengaruhi perubahan implementasi kebijakan luar negeri yang diinisiasi oleh kelompok eksekutif. Pada tahap ini, kelompok legislatif dapat mengadakan sesi dengar pendapat, menggiring opini publik, hingga meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dijalankan. Contoh dari peran ini adalah ketika negosiasi *the General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dengan Jepang pada era Presiden Lee Myung-bak tahun 2012 berjalan runyam saat mendapat tekanan dari kelompok legislatif dan publik Korea Selatan sehingga gagal ditandatangani pada masa itu (G. Lee 2018).

Terakhir, ratifikasi perjanjian internasional menjadi arena signifikan selanjutnya karena apapun perjanjian internasional yang telah disepakati, pemberlakuan di level nasionalnya tertakluk pada ratifikasi dari Majelis Nasional yang setidaknya membutuhkan persetujuan tiga per-lima anggota Majelis Nasional (G. Lee 2018). Hal ini menjadi ajang *check & balances* karena pada beberapa pemilihan umum legislatif terakhir sulit bagi satu partai politik mencapai persentase dominasi tersebut.

Selain poros trias politika, kelompok publik juga berperan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri di Korea Selatan. J. Kim (2018) menyatakan bahwa pengaruh kelompok publik terhadap kebijakan luar negeri turut dipengaruhi oleh popularitas dan sentimen publik terhadap politisi, termasuk presiden. Oleh karena itu, ada ikatan tarik-menarik antara publik & politisi dalam diskursus kebijakan luar negeri di Korea Selatan. Terlebih, G. Lee (2018) menerangkan bahwa antara kelompok legislatif & kelompok eksekutif cenderung menghindari aktivitas provokasi oposan selama *honeymoon period*, tahun pertama kabinet berjalan, sehingga momentum ini sering digunakan untuk merilis kebijakan luar negeri karena sentimen publik terhadap kabinet eksekutif masih tinggi.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri di Korea Selatan lebih banyak diinisiasikan oleh kelompok eksekutif melalui wewenangnya dan pada tahap tertentu kelompok legislatif & kelompok publik dapat memengaruhi melalui pembentukan opini publik dan sentimen sebagaimana G. Lee (2018) nyatakan di atas sebelumnya.

2.2 Pemengaruh Birokrat

Coplin (2003) menjelaskan bahwa subdeterminan ini merujuk pada individu dan kelompok aparatur fungsional yang membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan sebagai bagian dari lembaga eksekutif sehingga dalam konteks penelitian kali ini adalah yang menjalankan tugas di bawah arahan Presiden Moon Jae-in. Pengambil keputusan bergantung kepada kelompok birokrat untuk mengkomunikasikan kehendak serta menerima kembali respons dari aktivitas yang dilakukan.

Lebih lanjut, Deputy Menteri bidang Urusan Politik, Lee Jeong-kyu, pada 19 Juni 2017 mengadakan resepsi makan malam bersama 10 duta besar negara-negara anggota ASEAN. Sesi ini sebagai aksi lanjutan dari pengutusan utusan khusus presiden ke ASEAN dan momentum untuk membahas potensi peningkatan kerja sama diplomatik antara Korea Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN selama era presidensi baru Korea Selatan (Ministry of Foreign Affairs of South Korea 2017a).

Selain itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-hwa juga melakukan kunjungan ke India pada 4 Juli 2017. Pada kunjungan itu Menteri Kang bertemu dengan Shivsankar Menon, mantan penasihat urusan keamanan India, yang membahas perihal isu keamanan Semenanjung Korea dan memperluas konektivitas antara Korea Selatan dengan India & ASEAN melampaui regional Asia Timur (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2017c).

Pada 01 Agustus 2017 pula, Menteri Kang mengadakan pertemuan dengan ASEAN Committee in Seoul (ACS) yang berisikan 10 duta besar negara-negara anggota ASEAN di Korea Selatan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang baru dengan substansi meningkatkan hubungan dengan ASEAN sebagai usaha diversifikasi rekan diplomatik. Hal ini direspons oleh kelompok duta besar dari negara anggota ASEAN dengan apresiasi dan harapan untuk membawa hasil yang lebih nyata dari adanya usaha peningkatan hubungan kerja sama (Ministry of Foreign Affairs of South Korea 2017c).

Lima hari berselang, Menteri Kang bertemu dengan beberapa rekan sejawatnya selama kegiatan *ASEAN-related Foreign Ministerial Meeting* dan *the 20th ASEAN-ROK Ministerial Meeting* di Filipina (Ministry of Foreign Affairs of

South Korea 2017d). Pertemuan ini dimanfaatkan untuk kembali menggali potensi kerja sama dan menjelaskan kebijakan baru Korea Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN.

Rangkaian pertemuan yang dikepalai menteri dan deputi menteri dengan para duta besar serta figur ulung asal negara target merupakan kegiatan-kegiatan eksplorasi ide dan penyampaian kehendak. Selain itu, aktivitas ini pula mengakumulasi respons terhadap rencana tindakan yang hendak dilakukan. Selanjutnya, rangkaian-rangkaian tersebut menghasilkan insentif dari kelompok birokrat untuk diberikan kepada pengambil keputusan untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari konsideran.

Hal ini pula menyatakan bahwasannya terdapat orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap negara-negara Asia Tenggara dan India. Hematnya, Birokrat Korea Selatan ini berhasil memenuhi ekspektasi subdeterminan teori dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemengaruh yang dekat dengan pengambil keputusan, yaitu Presiden Moon Jae-in.

2.3 Pemengaruh Kepentingan

Pemengaruh kepentingan merupakan aktor kolektif yang memiliki kepentingan bersama, seperti perihal ekonomi, etnis, keagamaan, dan pemberdayaan. Pengaruh ini tidak secara langsung berefek pada tindakan politik luar negeri, tetapi kapasitas di level domestik, seperti dukungan finansial dan pembentukan isu menjadi konsideran penting bagi pengambilan keputusan.

Pemengaruh yang akan dibahas kali ini adalah Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI). KCCI merupakan mandataris dari Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (2014) yang melakukan kegiatan konsultasi

dengan pemerintah, merajut jaringan kerja sama dengan badan usaha mikro sampai konglomerat, dan aktivitas lain terkait kebijakan perdagangan dan industri Korea Selatan (Government of South Korea 2014). Selain itu, KCCI juga memiliki percabangan sebanyak 73 di seluruh Korea Selatan dan jejaring internasional di lebih dari 130 negara (Korea Chamber of Commerce and Industry, n.d.).

Dalam kapasitas dan capaiannya tersebut, KCCI memiliki kemampuan untuk memengaruhi pembentukan kebijakan. Beberapa aktivitas dan aspirasi dari KCCI tersebut adalah ketika pada Oktober 2015 mereka mengidentifikasi perubahan paradigma pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang akan berdampak pada lanskap perdagangan bilateral Korea Selatan dengan Tiongkok karena dalam beberapa tahun ke depan sifat hubungan akan berkembang menuju substitusi produk akibat kemiripan produk dan peningkatan kemampuan produksi. Oleh karena itu, KCCI merespons dengan tiga solusi, yaitu pertama identifikasi sektor bernilai tambah rendah supaya dapat menghasilkan keunggulan komparatif dibanding Tiongkok, kedua adalah menjangkau pasar potensial, seperti ASEAN, India, dan Timur Tengah, dan ketiga adalah memperkuat investasi dalam kegiatan riset & pengembangan (Korea Chamber of Commerce and Industry 2015).

Selain itu, KCCI juga dengan sigap menangkap potensi menjanjikan investasi infrastruktur yang menurut lembaga PricewaterhouseCoopers akan didominasi di Brazil, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, Tiongkok, & Turki dan memerlukan kerja sama publik-privat Korea Selatan untuk mengeksekusi ini (Korea Chamber of Commerce and Industry 2017a). KCCI juga membidik ASEAN sebagai alternatif dalam pertumbuhan diskursus proteksionisme global karena besarnya pasar konsumen, potensi produksi, dan tenaga kerja muda yang terampil

serta tren positif pertumbuhan ekonomi (Korea Chamber of Commerce and Industry 2017b). Selanjutnya, India juga atraktif dari sisi penjualan retail karena pertumbuhan ekonominya tinggi, besarnya pasar konsumen, kebijakan deregulasi pro-bisnis, dan perbaikan iklim investasi (Korea Chamber of Commerce and Industry 2017c).

KCCI secara total memanfaatkan kapasitas mewakili kelompok usahawan di Korea Selatan dan legitimasinya sebagai rekan konsultasi pemerintah mengenai kebijakan perdagangan & industri melalui penyuaran isu-isu pengembangan ekonomi, seperti identifikasi kompetitivitas dan peluang pasar melalui aktivitas penelitian dan operasional bisnis yang dilakukannya dan secara tidak langsung menjadi pondasi bagi Korea Selatan sendiri. Oleh karena itu, KCCI menjadi kelompok penting dalam menjelaskan orientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan yang sedang memperdalam hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan India.

Sebagaimana ekspektasi terhadap aktor ini, pengambil keputusan tidak dapat langsung menemukan keterhubungan dengan sikap politik luar negeri, tetapi konsiderasi besaran pengaruh KCCI di level domestik dan aspek luasnya sebagai bagian dari kepentingan nasional Korea Selatan menjadikannya penting.

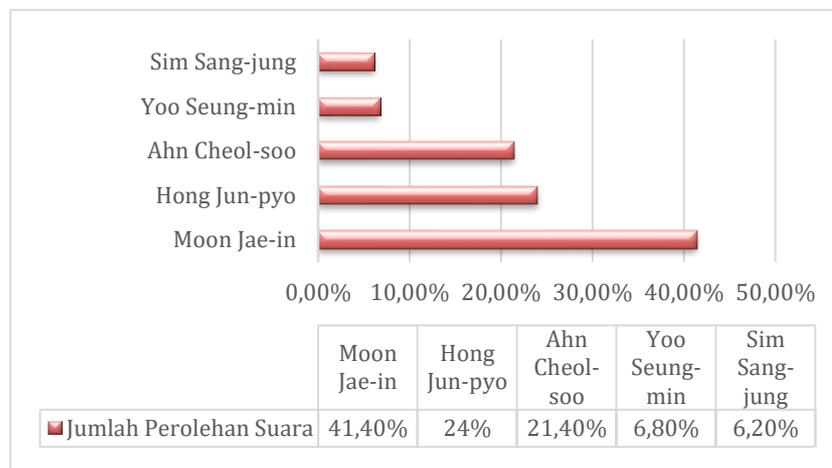
2.4 Pemengaruh Partai

Pemengaruh partai berpengaruh karena kapasitasnya mempolitisasi tuntutan masyarakat dan pada kasus kebijakan luar negeri, pemengaruh partai memfokuskan advokasi pada isu yang bercabang pada aspek kritis domestik. Pengaruh makin tampak melalui kegiatan pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum presiden (pilpres) ke-19 untuk masa jabatan 2017-2022 di Korea Selatan bertepatan pada bulan Mei 2017. Pilpres ini lebih cepat 6 bulan dari jadwal karena didahului pemakzulan atas presiden ke-18, Park Geun-Hye pada bulan Maret 2017 (Jaehyon Lee 2017). Presiden Park Geun-hye, dari Saenuri Party (konservatif), didakwa melakukan korupsi dan praktik kronisme selama presidensinya (McCurry 2017).

Hasil resmi pilpres ke-19 tahun 2017 dimenangkan oleh kandidat Moon Jae-in dengan perolehan suara 41,1 persen. Konsekuensinya adalah Moon Jae-in menjadi figur kunci dalam menentukan arah dan kebijakan luar negeri Korea Selatan selama era kepemimpinannya. Lebih lanjut, penulis lampirkan detail perolehan suara yang dikutip dari Atlas Nasional Korea Selatan edisi 2019.

Tabel 3. Hasil Pilpres ke-19 di Korea Selatan dalam Persentase



Sumber: National Geography Information Institute (2019a)

Selain memenangkan kandidat yang dicalonkan pada pilpres 2017, Democratic Party of Korea (DP) atau Partai Demokrat Korea sebelumnya telah berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif (pemilu) Majelis Nasional ke-20 pada 2016. Momentum kenaikan DP sebagai pilihan masyarakat berlanjut hingga

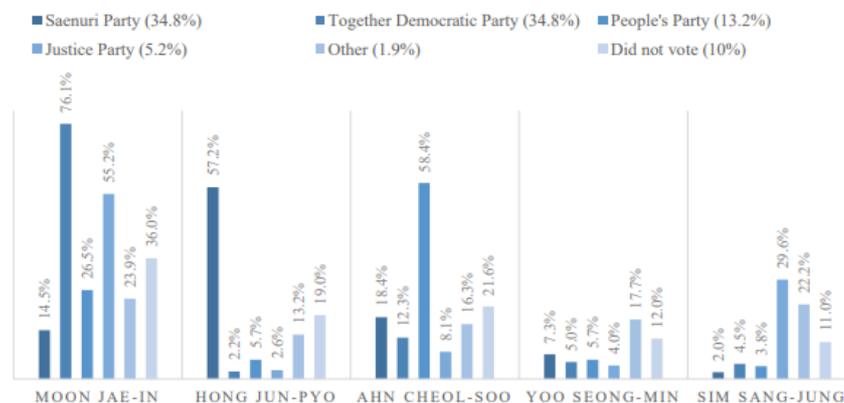
dapat menopang jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat Moon Jae-in pada pilpres 2017. Han, *et.al.* (2017) merangkumi data *exit poll* pilpres 2017 dari Korea Broadcasting System (KBS), Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), dan Seoul Broadcasting System (SBS) hingga menemukan bahwasannya lebih dari 75 persen pemilih DP pada pemilu legislatif 2016 kembali memilih kandidat yang disponsori oleh partai tersebut sebagaimana detailnya pada gambar 2.

Tabel 4. Hasil Perolehan Kursi Pemilu Majelis Nasional ke-20

Nama Partai	Jumlah Kursi
Democratic Party of Korea	123
Saenuri Party	122
People's Party	38
Justice Party	6
<i>Independent Members</i>	11

Sumber: National Geography Information Institute (2019b)

Gambar 2. Persentase Perolehan Kandidat Berdasarkan Pilihan Partai Peserta Pemilu Legislatif 2016 Responden



Sumber: Han et al. (2017)

Selain itu, DP merupakan partai beraliran liberal-progresif utama di Korea Selatan dengan partai utama konservatif pada masa pemilu legislatif 2016 & pilpres

2017 adalah Saenuri Party. Walaupun ada beberapa partai minor lain yang relatif mirip arah politiknya, mayoritas masyarakat dan politisi cenderung berpatokan kepada 2 partai utama.

Perbedaan ini berkonsekuensi pada kecenderungan derajat tertentu dalam isu-isu spesifik yang dihadapi oleh Korea Selatan. Penulis merangkum bagaimana Lee Sook-Jong (2005) memetakan polaritas beberapa isu. Selain itu, Lankov (2017) juga menyatakan bahwasannya persepsi terhadap kerja sama AS-Korea Selatan menghadapi perbedaan diskursus.

Tabel 5. Polaritas Konservatif-Progresif di Korea Selatan

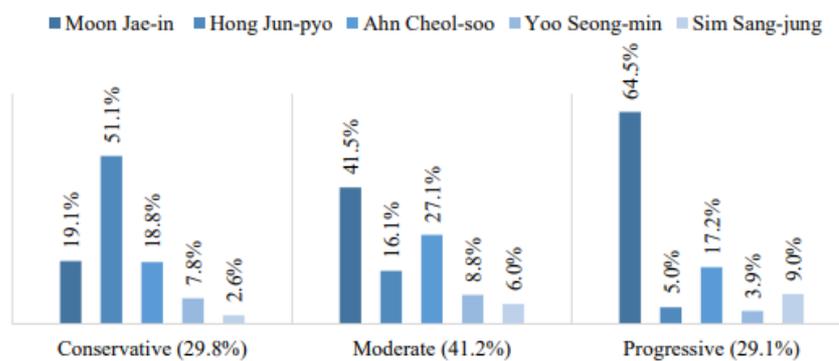
	Kelompok Konservatif	Kelompok Progresif
Pengembangan Hak Tenaga Kerja	Cenderung berhati-hati	Mendukung
Kebijakan terhadap Konglomerat	Intervensi minimal	Peningkatan Pajak
Isu Korea Utara	1. <i>Confidence-building</i> disertai kompensasi 2. Bersikap hati-hati dan curiga 3. Korea Utara sebagai ancaman nasional	1. Mendukung <i>engagement policy</i> 2. Mendukung <i>economic aid</i> 3. Bersimpati dan semangat kekeluargaan
Hubungan AS-Korea Selatan	Kebijakan luar negeri pro-AS	Lebih independen serta mendiversifikasi arah kebijakan luar negerinya

Sumber: Lee (2005), Lankov (2017)

Dari hal-hal tersebut, 65 persen dari para pemilih progresif mencoblos kandidat Moon Jae-in dan 8,9 persen untuk kedua kandidat konservatif. Sedangkan, 51,1 persen para pemilih konservatif memilih pada kandidat Hang Jun-pyo dan akumulasi untuk kedua kandidat progresif sebesar 21,7 persen sebagaimana detailnya pada gambar 3.

Pengaruh elektoral partai tersebut dapat dikaitkan dengan aspirasi kebijakan luar negeri melalui penerbitan Manifesto Kebijakan Pemilihan Presiden ke-19. DP memaparkan 4 visi utama dan 12 janji pada manifesto tersebut dan memuat kebijakan luar negeri Korea Selatan pada janji ke-9 dengan judul besar *A Strong and Peaceful Republic of Korea* (Democratic Party of Korea 2017). Lebih detail, DP menginisiasi *Northeast Asia Plus Responsibility Community and Expanding Space for Prosperity* dengan salah satu caranya meningkatkan kapasitas diplomasi dengan ASEAN dan India supaya setara empat rekanan utama.

Gambar 3. Persentase Perolehan Kandidat Berdasarkan Kecenderungan Ideologi Responden



Sumber: Han et al. (2017)

Dengan demikian, DP memiliki dua saluran dalam memengaruhi pengambilan kebijakan, yaitu saluran lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pada saluran legislatif, DP berhasil mengakumulasi tendensi masyarakat terhadap kebijakan yang beraliran liberal-progresif dengan menggiring para pemilihnya untuk kembali memilih kandidat yang disponsornya pada pilpres 2017 sebagaimana pada gambar 2 dan 3 tampilkan.

Hal ini menjadikan narasi mengenai peningkatan kapasitas diplomatik dengan negara-negara ASEAN dan India dalam manifesto kebijakan sebagai narasi yang didukung masyarakat. Analisis ini pula relevan dengan premis G. Lee (2018) mengenai salah satu momentum partisipasi kelompok legislatif, yang diisi oleh partai politik, dalam kebijakan luar negeri adalah ketika masa transisi menuju pemerintahan baru. Efeknya berupa capaian elektoral ini memperluas potensi realisasi kebijakan yang ditawarkan selama kampanye melalui kedudukan dalam lembaga legislatif.

Pada saluran eksekutif, figur pemenang memiliki afiliasi secara politis dengan DP dan secara tidak langsung berbagi ideologi yang sama dalam menyikapi kebijakan, termasuk dalam mewujudkan janji ke-9 dalam manifesto politik dan membuktikan adanya ikatan antara politisi dengan kelompok publik sebagaimana diasumsikan oleh J. Kim (2018) pada subbab mengenai kultur politik di Korea Selatan (lihat 2.1).

2.5 Pemengaruh Massa

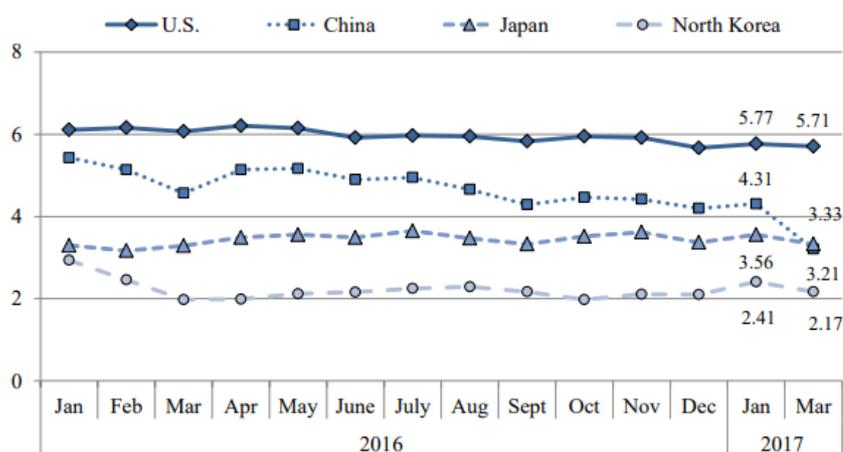
Pemengaruh massa diidentifikasi melalui iklim opini yang berkembang di masyarakat dan kontur demokrasi yang terbuka meniscayakan kelompok media & pemengaruh massa lainnya untuk membingkai opini sebagai bahan narasi untuk pemerintah konsiderasi keberadaannya. Opini publik di Korea Selatan mengenai hubungan luar negerinya dapat ditemui, seperti ketika Jiyoung et al. (2017) dari Asan Institute for Policy Studies melakukan survei yang hasilnya menunjukkan preferensi masyarakat Korea Selatan terhadap negara-negara tetangga pilihan.

Gambar 4 menunjukkan cenderung terjadinya penurunan preferensi terhadap keempat negara tetangga pilihan. Di antara keempat negara tersebut,

Tiongkok mengalami penurunan paling kontras sebesar 1 poin pada Maret 2017 dibanding Januari 2017 dan AS mengalami penurunan sebesar 0,06 poin pada periode yang sama. Penurunan kontras terhadap Tiongkok ini merupakan hal yang tak terhindarkan sebagai akibat dari penolakan kerasnya terhadap pengumuman instalasi THAAD oleh Korea Selatan pada kurung waktu 2016-2017.

Lebih jauh, Jiyoon et al. (2017) juga menjelaskan bahwasannya terjadi pergeseran opini publik mengenai sifat hubungan Korea Selatan dengan AS dan Tiongkok. Sebagaimana divisualisasikan pada gambar 5, perbandingan sifat hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok pada Maret 2016 dan Maret 2017 menunjukkan peningkatan persepsi sifat hubungan kompetisi sebesar 14,7 poin. Selain itu, peningkatan persepsi sifat hubungan kompetisi antara Korea Selatan dengan AS juga naik sebesar 2,2 poin yang menurut Jiyoon et al. (2017) dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan orientasi kebijakan *America First* Presiden Donald Trump.

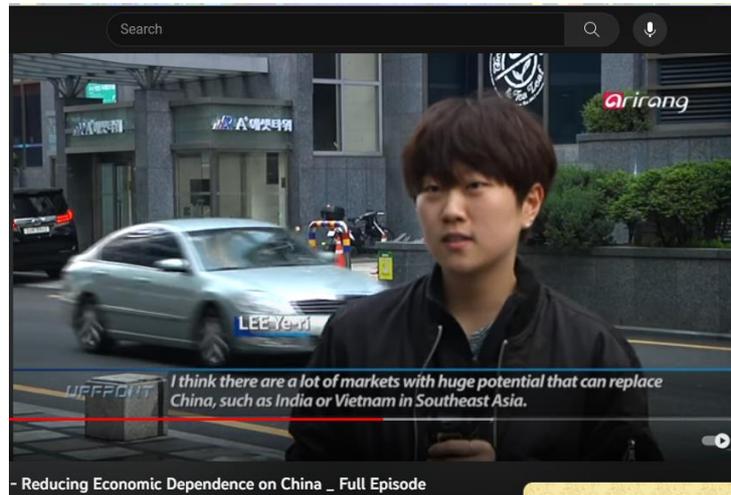
Gambar 4. Hasil Survei Preferensi Masyarakat Korea Selatan Terhadap Negara Tetangga Pilihan



Sumber: Jiyoon et al. (2017)

menyelesaikan perselisihan secara diplomasi. Sedangkan, tiga orang sebelumnya masing-masing menyatakan ada potensi untuk sanksi ekonomi berkembang ke arah spektrum politik, kemungkinan kenaikan upah buruh domestik, dan melihat potensi pasar lain seperti di India & kawasan Asia Tenggara.

Gambar 6. Cuplikan Siaran *Upfront* Episode Ke-159



Sumber: Arirang TV (2017)

Selain itu, opini publik mengenai popularitas kabinet presiden turut memainkan peran sebagaimana dielaborasi oleh J. Kim (2018) pada sub-bab Kultur Politik (lihat 2.1). Gallup Korea melakukan survei mengenai performa Presiden Moon Jae-in dan kabinetnya tak lama setelah terpilih dan hal ini menunjukkan popularitas masyarakat terhadap kebijakannya. Pada 100 hari pertama sekitar Agustus 2017, 78 persen responden merespons puas atas jalannya kabinet baru, 15 persen tidak puas, dan sisanya tidak berpendapat (Gallup Korea Research Institute 2017a).

Selanjutnya, 73 persen merespons positif dalam survei capaian kinerja enam bulan pertama, 18 persen merespons negatif, dan sisanya tidak berpendapat (Gallup Korea Research Institute 2017b). Terakhir, survei berikutnya khusus perihal

performa Presiden Moon Jae-in mengelola hubungan bilateral dengan 4 negara rekanan utama (AS, Jepang, Rusia, dan Tiongkok) plus kunjungan kenegaraan ke beberapa negara ASEAN. Survei tersebut menampakkan 73 persen responden mengapresiasi, 20 persen merespons kontradiktif, dan sisanya tidak berpendapat (Gallup Korea Research Institute 2017c).

Melalui opini publik & sentimen seperti inilah yang mampu membawa masyarakat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Penyalur opini publik yang dicontohkan, seperti Asan Institute of Policy Studies, Ariang TV, dan Gallup Korea Research Institute secara kolektif bekerja mengintervensi pengambilan kebijakan kelompok pemerintah melalui terbitan dan jangkauan massanya.

Selain ketiga kelompok sebelumnya, preferensi tersebut juga dapat dipolitisasi oleh kelompok partai politik sebagai saluran terlegitimasi dalam kultur politik. Dari sisi lembaga legislatif, hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh DP melalui manifesto kebijakannya pada pilpres 2017.

Sedangkan, kelompok eksekutif melalui Moon Jae-in, yang diuntungkan karena popularitas kinerja kabinet & kebijakannya berdasarkan tiga survei terlampir, sebagai aktor kunci perumus & pelaksana kebijakan luar negeri mengimplementasikannya dengan visi serupa dalam menavigasikan Korea Selatan supaya tidak terjebak di antara rivalitas AS-Tiongkok.

BAB III

DETERMINAN KONDISI EKONOMI & MILITER

Penulisan pada bab III akan melanjutkan uraian substansi beserta analisis mengenai kondisi ekonomi & militer. Pembahasan pada determinan ini terbagi menjadi dua, yaitu subdeterminan ekonomi dan subdeterminan militer.

3.1 Subdeterminan Ekonomi

Determinan kondisi ekonomi digunakan sebagai alat ukur untuk meninjau kapasitas ekonomi, seperti perdagangan dan finansial suatu aktor serta tingkat kebergantungannya terhadap dunia internasional. Performa perekonomian Korea Selatan dapat dicerminkan melalui indikator *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Gross National Income* (GNI). GDP merupakan estimasi nilai produksi barang & jasa yang dilakukan di suatu teritorial dalam jangka per tahun dan GNI merujuk pada total pendapatan yang didapatkan oleh individu dan/ kelompok atas usahanya, baik di dalam ataupun luar negeri, berdasarkan asas kewarganegaraan (Investopedia 2023). Tabel 6 mengilustrasikan jumlah GDP & GNI Korea Selatan.

Tabel 6. Performa GDP & GNI Korea Selatan 2011-2016

GDP	Tahun	GNI
1.250.000.000.000	2011	1.180.000.000.000
1.280.000.000.000	2012	1.290.000.000.000
1.370.000.000.000	2013	1.360.000.000.000
1.480.000.000.000	2014	1.430.000.000.000
1.470.000.000.000	2015	1.470.000.000.000
1.500.000.000.000	2016	1.500.000.000.000

Sumber: International Monetary Fund (2023); The World Bank (2023)

Dari nilai pendapatan tersebut, Korea Selatan merupakan negara yang bergantung pada perdagangan internasional dengan rata-rata rasio perdagangan terhadap GNI sebesar 95,13 persen sebagaimana merangkumi tabel 7. Hematnya, aktivitas perdagangan berperan besar dalam membiayai kepentingan nasional Korea Selatan dan menjadi pembentuk posisi daya tawarnya dalam hubungan internasional.

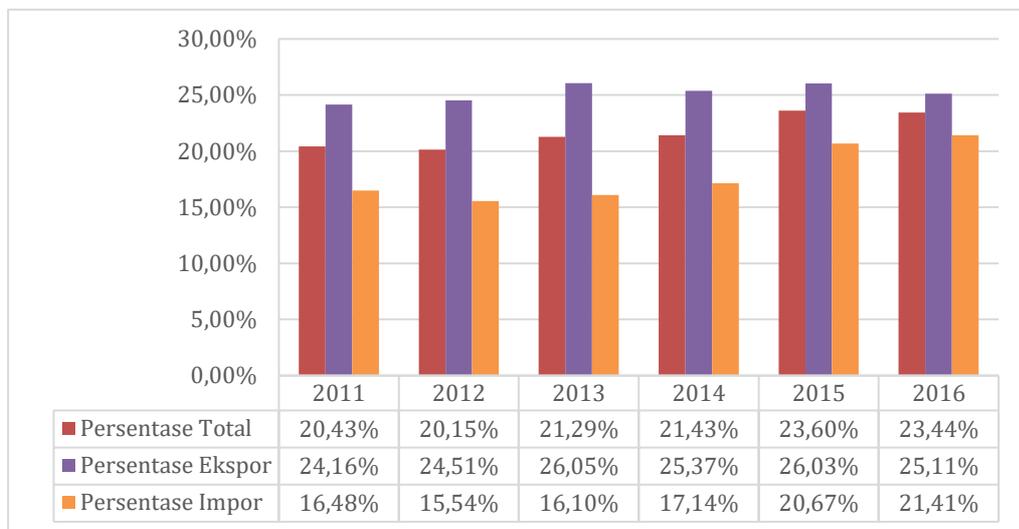
**Tabel 7. Rasio Perdagangan Terhadap GNI Korea Selatan
Periode 2011-2016**

Tahun	Persentase Rasio
2011	109,3 %
2012	108,3 %
2013	101,1 %
2014	93,8 %
2015	82 %
2016	76,6 %

Sumber: Jobst (2024)

Aktivitas perdagangan Korea Selatan sebagai bagian dari matra ekonomi menunjukkan peran signifikan dalam konsiderasi kebijakan luar negerinya. Contohnya pada postur perdagangan bilateral antara Korea Selatan dengan Tiongkok yang menunjukkan bahwa sejak 2011-2016 total perdagangan keduanya selalu melampaui 20 persen total perdagangan Korea Selatan. Lebih detail, Korea Selatan lebih dalam lagi melekat dengan Tiongkok di sisi ekspor pada periode yang sama dengan besaran selalu lebih dari 24 persen sebagaimana ditampilkan pada tabel 8.

Tabel 8. Performa Perdagangan RoK-Tiongkok Periode 2011-2016
Dalam Persentase



Sumber: Korea Customs Service (n.d.)

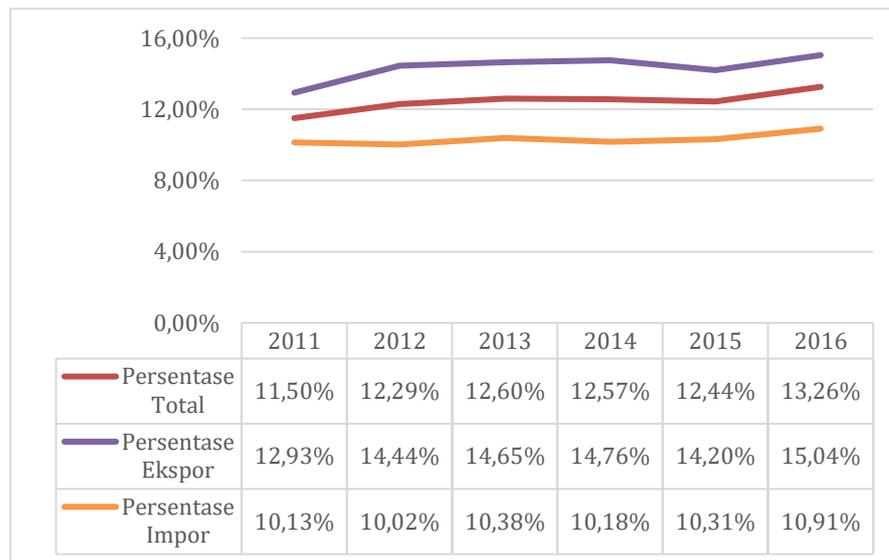
Secara garis besar, hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok didominasi oleh kepentingan ekonomi, tetapi rentan digoyah oleh urusan geopolitik seperti eksplanasi pada subbab mengenai *setting* ekologis (lihat 4.1). Pada interpretasi ini, hal-hal yang dapat dimaknai adalah pertama mengenai keterikatan mendalam melalui perdagangan nampak tidak menjadikan interaksi antara entitas terlibat konstruktif, malah cenderung dijadikan alat untuk menunjukkan kedigdayaan daya tawar sebagaimana Korea Selatan terkekang oleh postur perdagangan bilateralnya dengan Tiongkok. Interpretasi kedua adalah keterhubungan antara subbab *setting* ekologis dan subdeterminan ekonomi sehingga menunjukkan kohesivitas masing-masing determinan dalam membentuk pengaruh pengambilan keputusan.

Sejalan dengan narasi peningkatan kapasitas diplomasi dan perluasan pasar yang muncul pada analisis sub-subbab pemengaruh partai (lihat 2.4) dan pemengaruh kepentingan (lihat 2.3), performa perdagangan bilateral antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India pada periode yang sama juga perlu ditelisik.

Meskipun secara jumlah tahunan cenderung fluktuatif, besaran persentase perdagangan keduanya relatif stabil pada 2011-2016 selalu berada di atas 11 persen dan persentase ekspor selalu berada di atas 12 persen. Sedangkan, performa perdagangan dengan India selalu di atas besaran 1,5 persen dengan persentase ekspor lebih dari 2 persen. Penulis tampilkan lebih lanjut pada tabel 9 dan 10.

Mengelaborasi mengenai besaran rasio perdagangan terhadap GNI dan postur perdagangan bilateral dengan Tiongkok, strategi diversifikasi rekan perdagangan Korea Selatan menjadi jelas ketika melihat bagaimana pada NSP digulirkan yang tidak hanya membidik eskalasi performa perdagangan melalui pilar *Prosperity*, tetapi juga berusaha memperluas ruang gerak politik luar negeri Korea Selatan dengan menumbuhkan sentimen positif melalui pilar *People* sehingga inisiatif tersebut dapat menguntungkan Korea Selatan dua kali.

Tabel 9. Performa Perdagangan Korea Selatan dan ASEAN 2011-2016 Dalam Persentase



Sumber: Korea Customs Service (n.d.)

Tabel 10. Performa Perdagangan Korea Selatan dan India 2011-2016 Dalam Persentase



Sumber: Korea Customs Service (n.d.)

3.2 Subdeterminan Militer

Performa militer Korea Selatan pula tercermin dalam *Defense White Paper* yang diterbitkan oleh Ministry of National Defense tiap dua tahun sekali. Penulis merangkum kapabilitas militer ini berdasarkan *White Paper* edisi 2012, 2014, dan 2016 pada tabel 11 dan 13. Dari sumber yang sama, penulis pula merangkumi kapabilitas militer Korea Utara dalam tabel 12 dan 13 selaku aktor tandingan dalam diskursus Semenanjung Korea yang dielaborasi pada subbab *setting* ekologis (lihat 4.1) sehingga diidentifikasi adanya ketimpangan kapasitas.

Dengan demikian, historisitas aliansi Korea Selatan dengan AS menjadi relevan hingga ke periode penelitian ini. Pada jumlah personel dan mengecualikan matra laut, Korea Selatan sangat jauh berada di bawah kapasitas Korea Utara. Begitu juga dengan gambaran sistem persenjataan, Korea Selatan hanya mengungguli Korea Utara pada beberapa tipe saja, seperti sistem radar dan helikopter. Hal ini menjelaskan pula bagaimana isu THAAD yang melibatkan AS

pula menjadi bukti bahwa Korea Selatan masih perlu bergantung dengan aliansi tersebut dalam masa dekat untuk memberikan efek gentar.

Sikap *like-minded partnership* Korea Selatan dengan AS juga dapat diulas dari besarnya biaya perdagangan persenjataan (*arms trade*) antara keduanya. Korea Selatan merupakan negara terbesar ke-4 dengan persentase 6,4% dari total penjualan senjata AS pada 2011-2015 (Rugy 2016) dan penulis mengutip total perdagangan senjata dari AS ke Korea Selatan yang dirangkum oleh The Observatory of Economic Complexity sebesar \$2,03 miliar dengan sebaran asal impornya diilustrasikan pada gambar 7.

Tabel 11. Gambaran Jumlah Sistem Persenjataan Korea Selatan 2011-2016

Persenjataan	Jumlah	Persenjataan	Jumlah
Helikopter	680 (2011-2012)	Kapal Kombat	120 (2011-2012)
	690 (2013-2016)		110 (2013-2016)
Peluncur Misil	30 (2011-2012)	Pesawat Kombat	460 (2011-2012)
	60 (2013-2016)		400 (2013-2014)
			410 (2015-2016)
Kapal Amfibi	10	Sistem Radar	50 (2011-2012) 60 (2013-2016)
Kapal Selam	10	Tank	2.400

Sumber: Ministry of National Defense (2012); Ministry of National Defense (2014); Ministry of National Defense (2016)

Tabel 12. Gambaran Jumlah Sistem Persenjataan Korea Utara 2011-2016

Persenjataan	Jumlah	Persenjataan	Jumlah
Helikopter	300 (2011-2014) 290 (2015-2016)	Kapal Kombat	420 (2011-2014) 450 (2015-2016)
Peluncur Misil	100	Pesawat Kombat	820 (2011-2014) 830 (2015-2016)
Kapal Amfibi	260 (2011-2014) 250 (2015-2016)	Sistem Radar	30 (2011-2016)
Kapal Selam	70	Tank	4.200 (2011-2014) 4.300 (2015-2016)

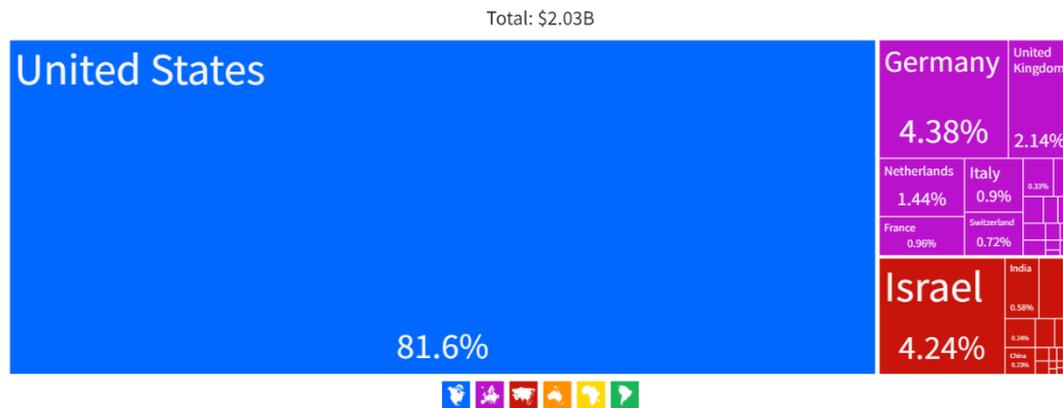
Sumber: Ministry of National Defense (2012); Ministry of National Defense (2014); Ministry of National Defense (2016)

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Personel Militer Periode 2011-2016

Matra Tentara	Personel Korea Selatan	Personel Korea Utara
Matra Darat	506.000 (2011-2012) 495.000 (2013-2016)	1.020.000 (2011-2014) 1.100.000 (2015-2016)
Matra Laut	68.000 (2011-2012) 70.000 (2013-2016)	60.000 (2011-2016)
Matra Udara	65.000 (2011-2016)	110.000 (2011-2012, 2015-2016) 120.000 (2013-2014)
Korps Cadangan	3.200.000 (2011-2012) 3.100.000 (2013-2016)	7.700.000 (2011-2014) 7.620.000 (2015-2016)

Sumber: Ministry of National Defense (2012); Ministry of National Defense (2014); Ministry of National Defense (2016)

Gambar 7. Sebaran Rekan Perdagangan Senjata Korea Selatan 2011-2016



Sumber: The Observatory of Economic Complexity (n.d.)

Dengan demikian, kapasitas Korea Selatan dipersepsikan oleh pemangku kepentingan domestik sebagaimana diuraikan dan disandingkan dengan kapasitas Korea Utara tidak cukup untuk memberikan efek gentar. Untuk itu, pembentukan aliansi menjadi pilihannya dan ikatan ekonomi strategis pula terjalin dengan dalamnya jumlah impor senjata dari AS ke Korea Selatan.

Apabila dikombinasikan dengan argumen pada subbab *setting* ekologis mengenai aliansi militer berlatar isu THAAD, timpangnya kapasitas militer Korea Selatan hingga pada era terkini mengakibatkan urgensi yang makin dalam untuk memastikan kalkulasi kapasitas militer Korea Selatan dalam merespons aktivitas Korea Utara di Semenanjung Korea turut serta dalam pengambilan keputusan luar negeri.

BAB IV

DETERMINAN KONTEKS INTERNASIONAL

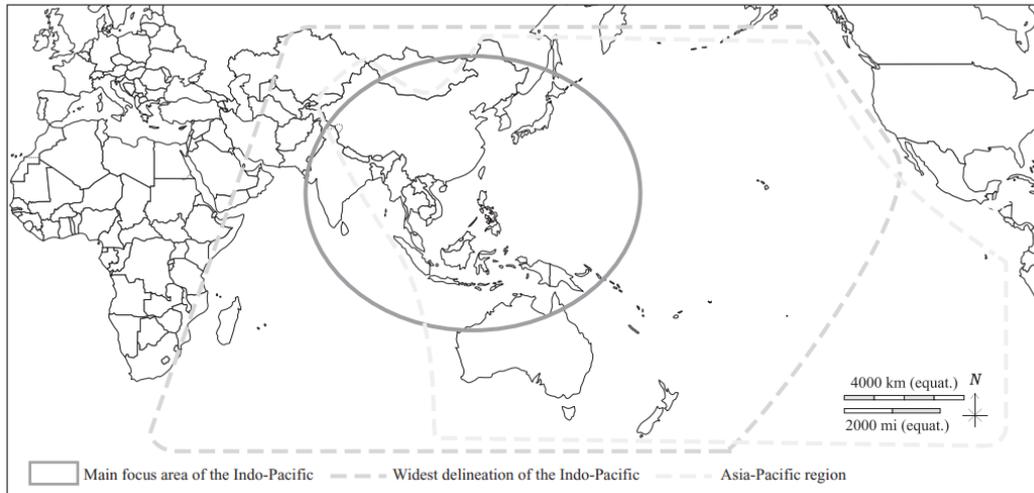
Bab IV akan menguraikan substansi beserta analisis mengenai determinan yang terakhir, yaitu determinan konteks internasional. Pembahasan determinan ini akan meliputi tiga subdeterminan, yaitu *setting* ekologis, arus manusia, dan pola interaksi rutin antar-pejabat pemerintah.

4.1 *Setting* Ekologis

Setting ekologis membentangkan perihal pengaruh kondisi lingkungan sekitar negara yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam konteks perumusan *New Southern Policy*, narasi mengenai Indo-Pasifik merupakan salah satu *setting* geografis yang signifikan. Narasi mengenai regionalisasi Indo-Pasifik merupakan diskursus yang berkembang dari regionalisasi Asia-Pasifik (Barbara Kratiuk et al. 2023). Sisi lain kemunculan narasi ini pada 1 dekade terakhir adalah berkaitan dengan usaha membendung perluasan kebangkitan Tiongkok sebagai hegemon baru. Berikut cakupan regionalisasi sebagaimana penulis mengutip karya Barbara Kratiuk et al. (2023) pada gambar 8 di bawah ini.

Perluasan cakupan regionalisasi diikuti dengan berpacunya beberapa negara sejak 2011 dalam menyusun kebijakan luar negeri, pertahanan, atau ekonomi pembangunan yang memperhatikan perkembangan Indo-Pasifik ini. Pada Oktober 2011, Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri AS menyampaikan bahwa tugas besar AS pada masa itu adalah mencapai kepentingan nasionalnya melalui investasi sosial & ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, yang melintang dari subbenua India ke pantai barat Samudra Pasifik, sehingga pemerintahan Obama secara komprehensif dan gigih akan merajutnya (Clinton 2011). Aktivitas tersebut dikenal sebagai *Rebalance to the Asia & Pacific*.

Gambar 8. Pemetaan Regionalisasi Asia-Pasifik & Indo-Pasifik



Sumber: Barbara Kratiuk et al. (2023)

Tiongkok pula merilis kebijakan *Belt & Road Initiative* September 2013 (Ujvari 2017) yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok dengan mitranya yang membentang di kawasan Afrika, Asia, dan Eropa melalui sabuk ekonomi dan jalur maritim (Barbara Kratiuk et al. 2023). Selanjutnya, India pada November 2014 pula meluncurkan *Act East Policy* yang bertujuan untuk mendorong keterikatan ekonomi, budaya, dan hubungan strategis antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik guna meningkatkan konektivitas di kawasan timur laut India (Akbar and Nuraeni 2023).

Jepang yang memimpin diskusi modern mengenai Indo-Pasifik melalui pidato Perdana Menteri Shinzo Abe di Parlemen India pada 2007 baru merilis visi *Free & Open Indo-Pacific* pada Agustus 2016 dengan menyampaikan bahwa adalah kewajiban Jepang untuk memupuk nilai kebebasan, ketaatan hukum, ekonomi pasar, kebebasan dari kekerasan, dan kesejahteraan di kawasan Samudra Hindia & Samudra Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2016). Korea Selatan sendiri cenderung menggunakan pendekatan kontinental Eurasia sebagai

pangkal kebijakan luar negerinya pada 2013 dan belum secara implisit maupun eksplisit menunjukkan keterlibatan Korea Selatan dalam membentuk arsitektur regional yang dipengaruhi oleh narasi Indo-Pasifik.

Namun, tipikal kehati-hatian dalam menyatakan sikap mengenai arah narasi Indo-Pasifik oleh Korea Selatan secara cermat diterjemahkan dalam *New Southern Policy* setelahnya. Presiden Moon Jae-in tidak pernah mengklaim *New Southern Policy* sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifiknya saat awal dirilis supaya tidak memperumit hubungan dengan Tiongkok yang retak pasca-THAAD.

Lee Ji-Young (2020) mencatatkan tes senjata nuklir ke-4 Korea Utara pada Januari 2016 merenggangkan hubungan Korea Selatan dengan Tiongkok. Pada momen ini, Korea Utara mengklaim telah berhasil meluncurkan bom hidrogen mini yang perlahan jarak tempuhnya akan mencapai daratan utama AS dan sebagai bagian dari usaha pertahanan diri dari AS (McCurry and Safi 2016). Kecaman tidak muncul dari Tiongkok kali ini, lain ketika ia ikut mengecam aksi tes ke-3 pada Februari 2013, termasuk mengurangi komunikasi strategis & mendorong kelanjutan *Six Party Talks* (Duchatel and Schell 2013).

Aksi tes senjata ke-4 menuntun Korea Selatan untuk menginstalasi THAAD yang proses diskusinya berlangsung sejak Februari 2016 dan pemasangan bertahap dilakukan sejak Juli 2016 yang disponsori oleh AS dengan tujuan sebagai bentuk pertahanan untuk mengamankan Korea Selatan dan rakyatnya serta melindungi angkatan militer sekutu dari ancaman misil balistik & senjata pemusnah masal Korea Utara (Institute of Security & Development Policy 2017). Tiongkok dan Rusia secara keras kontra terhadap instalasi ini karena daya jangkau THAAD

dianggap memberikan kesempatan untuk aliansi sekutu AS mencapai teritorial mereka secara *remote* (Reals 2017).

Buntut dari instalasi ini adalah implementasi sanksi ekonomi Tiongkok terhadap Korea Selatan. Qin & Sang-hun (2016) merapal bahwa sektor hiburan & budaya kontemporer khas Korea Selatan, K-Pop, menjadi sektor yang terdampak terlebih dahulu. Kegiatan jumpa penggemar selebriti Kim Woo-bin & Suzy dan konser grup idola EXO ditunda oleh masing-masing promotor pada bulan Agustus 2016 (Qin and Sang-hun 2016).

Ja-young (2017) mencatatkan pula gagal lolosnya izin impor 19 perusahaan produk kosmetik Korea Selatan ke Tiongkok pada Januari 2017 serta mengutip pernyataan media lokal Tiongkok, *Global Times*, mengenai kegandrungan masyarakat Tiongkok terhadap produk Korea Selatan yang tidak dapat menggeser identitas mereka & kepekaan terhadap turbulensi hubungan yang berpotensi mengancam kepentingan nasional Tiongkok. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga menandatangani penawaran paket wisata ke Korea Selatan melalui agen lokal pada Maret 2017. Hal ini bercabang dampaknya kepada sektor lain, seperti *duty-free shop* yang secara tahunan dapat meraup \$8 miliar dolar AS dari wisatawan Tiongkok (Reuters 2017b).

Konglomerat ritel asal Korea Selatan, Lotte Group, juga terdampak dari sanksi Tiongkok ini. Sejak Desember 2016, pemerintah Tiongkok melakukan investigasi kepatuhan pajak dan aturan mitigasi kebakaran di 120 cabang Lotte di Tiongkok (Joyce Lee 2017). Akhirnya, sekitar 90 persen dari cabang Lotte Mart di Tiongkok berhenti beroperasi karena dalam masa investigasi dan maraknya protes anti-Korea pada Mei 2017 (Yonhap News Agency 2017a).

Hal ini diperkirakan berdampak rugi \$264 juta dolar AS jika selama 3 bulan ke depan tutup dan estimasi akumulasi kerugian dari seluruh lini bisnis Lotte Group yang terdampak dari manuver Tiongkok ini sebesar ₩500 miliar won Korea Selatan. Lebih jauh, Lotte berkontribusi dalam instalasi THAAD karena menyetujui penempatan alat pertahanan diri itu di tanah miliknya di Seongju, tenggara dari Seoul pada Februari 2017 (Reuters 2017a).

Beberapa aktivitas kontra-produktif lain yang termasuk manuver Tiongkok adalah penghambatan pengiriman pembayaran remitansi ke pebisnis Korea Selatan, diskriminasi dalam pengesahan prosedur & proses audit, dan kegiatan peretasan (H.-Y. Lee 2017). Fluktuasi yang dinamis sejak 2013 hingga triwulan awal 2017 ini makin kompleks ditambah proses pemakzulan Presiden Park.

Oleh karena itu, NSP merupakan instrumen bagi Korea Selatan dalam memastikan turut serta membangun arsitektur regional karena amat jelas negara-negara target NSP merupakan aktor-aktor kunci dalam regional Indo-Pasifik sehingga hal ini mendasari keterkaitan antara potensi mencapai kepentingan & menyusun arsitektur regional melalui peningkatan interaksi dengan aktor kunci di kawasan sekitar Korea Selatan berada seraya memperbaiki hubungan yang retak dengan rekan dagang terbesarnya sekaligus negara yang sedang dibendung pertumbuhannya melalui abstraksi Indo-Pasifik.

Selain itu, Semenanjung Korea yang hampir 70 tahun menjadi *hotspot* konflik mendorong Korea Selatan melakukan segala upaya untuk mendeeskalasi konflik di tengah gencaran aktivitas provokasi & uji senjata canggih Korea Utara. Korea Utara cenderung menggunakan provokasi & ancaman terhadap Korea

Selatan, AS, dan sekutunya dalam menyampaikan & mencapai kepentingan nasionalnya.

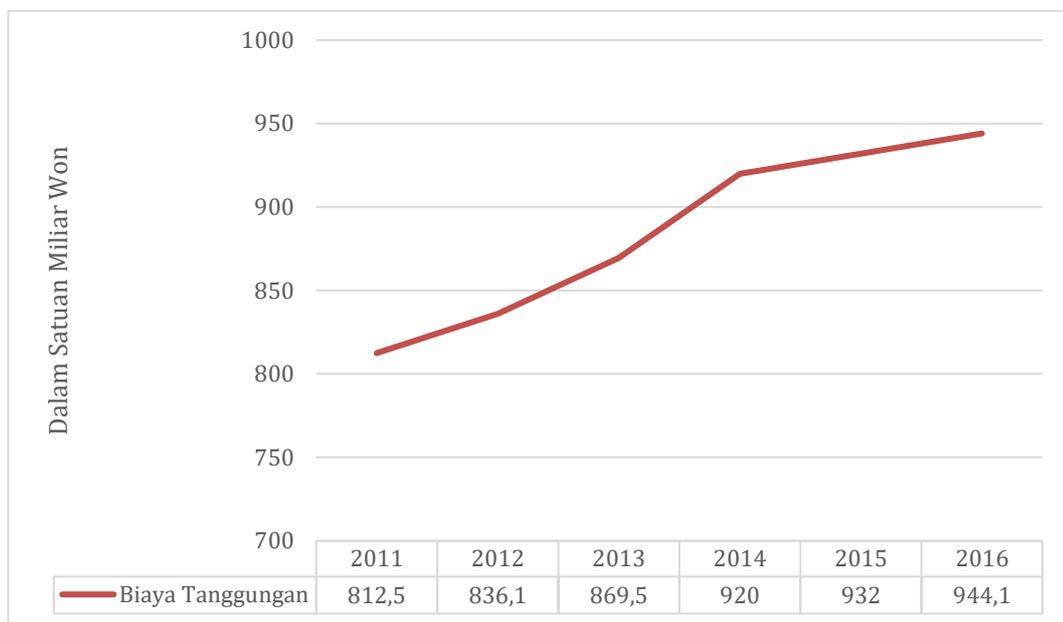
Defense White Paper edisi 2014 & 2018 mencatatkan ada 249 aksi provokasi lokal & infiltrasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan selama 2011-2016. Beberapa aksi kontroversial lain juga dapat ditemukan, seperti pernyataan juru bicara Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland (CPRF) pada tahun 2012 merujuk pada penyerangan Korea Utara terhadap Pulau Yeonpyong, Korea Selatan pada tahun 2010 sebagai “hukuman yang pantas”, serta mengancam akan melancarkan serangan yang kedua (Ministry of National Defense of South Korea 2014).

Lebih lanjut, Korea Utara juga melangsungkan uji senjata nuklir yang ke-4 dan senjata misil jarak jauh pada Januari & Februari 2016 yang diikuti oleh rilisnya Resolusi 2270 pada Maret 2016 berisikan beberapa hal, seperti perluasan embargo senjata dan langkah non-proliferasi, mengenakan aturan inspeksi kargo & prosedur maritim baru kepada kapal menuju/dari Korea Utara hingga larangan menjamu pelatih, penasehat, dan pejabat terkait aktivitas pelatihan militer (United Nations Security Council 2016). Oleh karena itu, pilar *Peace* dapat diasumsikan merupakan salah satu cara mencapai deeskalasi konflik melalui penglibatan negara-negara ASEAN khususnya dalam mengelola hubungan dengan Korea Utara agar turut serta membantu mencapai perdamaian.

Selain penglibatan negara-negara ASEAN, aliansi militer antara Korea Selatan dengan AS turut membentuk latar politis kebijakan. Aliansi Korea Selatan-AS terbentuk di bawah *Mutual Defense Treaty* per tanggal 01 Oktober 1953 dan seterusnya hubungan ini berkembang menghasilkan *US-RoK Status of Forces*

Agreement 1966 dengan meniscayakan penempatan sumber daya militer AS di Korea Selatan (The Government of the United States of America, n.d.). Penempatan ini pula berimplikasi pada pembagian tanggungan operasional pertahanan antara Korea Selatan dengan AS dan penulis menyajikan jumlah biaya yang ditanggung oleh Korea Selatan pada tabel 6 mengutip data dari Statista.

Tabel 14. Jumlah Tanggungan Operasional Pertahanan Oleh Korea Selatan 2011-2016



Sumber: L. (2023)

Biro Urusan Politik-Militer Kementerian Luar Negeri AS mencatatkan lebih dari 28.500 tentara AS bekerja sama dengan tentara Korea Selatan & negara partisipan United Nations Command untuk menyelenggarakan usaha pertahanan atas ancaman dari Korea Utara serta melanggengkan *the Korean Armistice Agreement* (Bureau of Political-Military Affairs 2023). Setidaknya ada 83 kamp militer tentara AS di Korea Selatan dari total 800 di dunia (Borowiec 2017).

Dengan demikian, ikatan politik strategis antara AS dan Korea Selatan merupakan usaha memberikan efek gentar dan perimbangan kekuatan terhadap

Korea Utara yang mengaspirasikan reunifikasi di bawah pemerintahan komunis. Eksplanasi sebelum ini menegaskan urgensi dan kesakralan aliansi Korea Selatan dengan AS sebagai suatu kewajiban yang akan selalu dijaga sampai tercapainya perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Sekalipun Tiongkok yang secara proksimitas lebih dekat dengan Korea Selatan dan memiliki hubungan dagang yang dalam dibandingkan dengan Amerika Serikat, hal ini tidak lantas memberikan jaminan bahwa Tiongkok dapat menjadi penjamin keamanan Korea Selatan atas perilaku Korea Utara seperti saat uji senjata nuklir ke-4 Januari 2016.

Tiongkok justru bermanuver kontra-produktif terhadap instalasi THAAD oleh Korea Selatan melalui retaliasi ekonomi sehingga mempertemukan narasi kompleks geopolitik-ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi postur kebijakan Korea Selatan untuk mencapai kepentingannya.

Tiongkok pada tahap ini tidak dapat dijadikan penjamin keamanan utama Korea Selatan dan sebaliknya memberikan ketidakamanan atas manuver retaliasi ekonominya. Oleh karena itu, dual spektrum ancaman – militer oleh Korea Utara dan ekonomi oleh Tiongkok – masa itu perlu dikelola dengan hati-hati melalui pencarian rekan yang dapat diandalkan dan membina komunikasi supaya tidak makin destruktif.

Hematnya, kehati-hatian Korea Selatan dalam adopsi narasi Indo-Pasifik supaya optimal ruang kebijakan luar negerinya, isu keamanan di Semenanjung Korea, serta nilai strategis aliansi militer dengan AS menuntun Korea Selatan untuk memproduksi kebijakan luar negeri yang sarat akan mencapai kepentingan nasional dan tanggap dalam merespons perkembangan dinamika di sekitarnya seperti NSP.

4.2 Arus Manusia

Arus manusia berpotensi mendorong eksplorasi gagasan & sentimen antara kelompok penerima dan kelompok pendatang. Hal ini pula dapat memengaruhi kalkulasi perumusan kebijakan apabila volume mobilitas yang terjadi berpotensi menyumbang nilai keekonomian atau aspek kepentingan nasional lain. Praktik mobilitas ini mirip prinsip ekonomi pasar penawaran-permintaan.

Mobilitas manusia ke Korea Selatan dari negara-negara ASEAN pada 2011-2016 menunjukkan angka yang berkembang naik. Pada tabel 15 di bawah ini, penulis tampilkan jumlah kedatangan warga negara beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang dipublikasikan oleh Korea Statistical Office (KOSIS).

Selain itu, mobilitas manusia ke Korea Selatan dari India pula pada 2011-2016 menunjukkan angka yang berkembang naik, bahkan lebih progresif dibandingkan dengan data ASEAN. Pada tabel 16 di bawah ini, penulis tampilkan jumlah kedatangan warga negara India yang dipublikasikan oleh KOSIS.

Rangkuman penulis adalah besaran persentase jumlah kedatangan warga ASEAN dibanding total seluruh kedatangan internasional ke Korea Selatan sebesar 12,55 persen dan kedatangan warga India ke Korea Selatan cenderung meningkat dengan peningkatan tahun antara 2011 & 2016 sebesar 112 persen. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi penawaran Korea Selatan yang menarik mobilitas manusia karena daya tarik seperti K-Pop, teknologi otomotif, dan peluang kerja.

**Tabel 15. Volume Mobilitas Masyarakat Asal ASEAN
ke Korea Selatan 2011-2016**

Tahun	Total Keseluruhan	Total Asal ASEAN
2011	9.794.796	1.234.281
2012	11.140.028	1.393.180
2013	12.175.550	1.572.773
2014	14.201.516	1.781.168
2015	13.231.651	1.599.985
2016	17.421.823	2.204.977
	77.965.364	9.786.364

Sumber: Korean Statistical Information Service (n.d.)

Besaran mobilitas ini jelas memikat karena bersama dengan besaran tersebut, keadaan ekonomi di wilayah ASEAN & India cenderung bertumbuh sehingga momentum ini perlu dirancang untuk mencapai kepentingan nasional Korea Selatan, seperti ekspansi pasar, perputaran modal, hingga investasi sosial sebagaimana pilar *People* dapat ditemukan dalam NSP.

**Tabel 16. Volume Mobilitas Masyarakat Asal India
ke Korea Selatan 2011-2016**

Tahun	Total Keseluruhan	Total Asal India
2011	9.794.796	92.047
2012	11.140.028	92.700
2013	12.175.550	121.720
2014	14.201.516	147.736
2015	13.231.651	153.602
2016	17.421.823	195.911
	77.965.364	803.716

Sumber: Korean Statistical Information Service (n.d.)

Selain itu, beberapa negara ASEAN, seperti Filipina, Indonesia Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, merupakan rekanan kerja sama pemerintah Korea Selatan untuk menyuplai tenaga kerja di bawah rezim

Employment Permit System (EPS) sejak 2004 yang dikelola oleh Human Resources Development Service of Korea (HRD-K).

Rezim EPS ini mengizinkan pengusaha lokal Korea Selatan untuk merekrut pekerja asing pada area industri tertentu, yaitu konstruksi, manufaktur, perikanan, pertanian, dan peternakan yang jumlah pegawainya kurang dari 300 orang (Ministry of Employment and Labor of South Korea, n.d.). Skema visa yang didapatkan di bawah rezim ini pun berbeda, yaitu kelompok *non-professional employment (E-9)* dan *working visit (H-2)* bagi mereka yang beretnis Korea, tetapi bukan berkewarganegaraan Korea Selatan. Pada tabel 17 di bawah, penulis sampaikan jumlah tenaga kerja asing di Korea Selatan pada periode 2012-2016 disertai jumlah pekerja kelompok penerima visa E-9, serta volume negara ASEAN yang dominan tercantum dalam sumber kutipan.

**Tabel 17. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Korea Selatan
Dari ASEAN Periode 2012-2016**

Tahun	Jumlah Total	Jumlah Dominan ASEAN
2012	791.000 (238.000: E-9)	82.000 (Vietnam), 31.000 (Indonesia)
2013	761.000 (226.000: E-9)	76.000 (Vietnam), 29.000 (Indonesia)
2014	852.000 (247.000: E-9)	72.000 (Vietnam), 35.000 (Indonesia)
2015	938.000 (264.000: E-9)	76.000 (Vietnam), 39.000 (Indonesia)
2016	962.000 (261.000: E-9)	72.000 (Vietnam), 37.000 (Indonesia)

Sumber: Statistics Korea (2012); Statistics Korea (2013); Statistics Korea (2014); Statistics Korea (2015); Statistics Korea (2016)

Dengan demikian, timbul permintaan arus manusia oleh Korea Selatan untuk memenuhi posisi kerja pada sektor yang membutuhkan keterampilan rendah atau tidak atraktif bagi penduduk lokal sehingga menghasilkan kerja sama impor pekerja asing melalui kerja sama bilateral bersasar. Beberapa negara ASEAN yang menjalin kerja sama di bawah rezim EPS ini pun secara kuantitas juga besar.

Vietnam dan Indonesia yang selalu muncul sebagai di antara 5 besar penyumbang tenaga kerja asing pada periode 2012-2016 dengan persentase konsisten berada di atas 11 persen.

Selain itu, hal ini akan berhubungan dengan kapasitas ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan sebagaimana dielaborasi pada subbab mengenai subdeterminan ekonomi (lihat 3.1) yang menunjukkan vitalnya perputaran roda perekonomian.

4.3 Pola Interaksi Rutin

Pola interaksi rutin merujuk pada aktivitas pertemuan pejabat berwenang yang intensitasnya dapat mencerminkan atmosfer hubungan, apakah positif atau negatif. Menambahkan dari beberapa aktivitas kelompok birokrat yang diuraikan pada subbab mengenai pemengaruh birokrat (lihat 2.2), Presiden Moon Jae-in pula berusaha membentuk citra prioritas Korea Selatan terhadap negara-negara target melalui pengutusan utusan khusus.

Salah satu yang terawal adalah penunjukan Walikota Seoul masa itu sekaligus anggota Partai Demokrat, Park Won-soon, sebagai utusan khusus presiden ke ASEAN dan negara-negara anggotanya pada Mei 2017 (Yonhap News Agency 2017b). Selanjutnya, utusan khusus presiden ke India & Australia diemban oleh mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata era Presiden Roh Moo-hyun, Chung Dong-chea pada Juni 2017 (The Korea Herald 2017).

Usaha ini berefek pada citra pemerintahan Korea Selatan yang baru yang memprioritaskan negara-negara ASEAN dan India. Pimpinan negara seperti Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyambut baik inisiatif Korea Selatan untuk meningkatkan kapasitas diplomatik

yang dibarengi dengan eksplorasi potensi kerja sama ekonomi (Cabinet Secretariat of Indonesia 2017; Park 2018).

Selain itu, upaya ini merupakan pembuka dari rangkaian beberapa pertemuan dengan figur lain oleh pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sebagai bagian dari aksi *confidence-building* dan mengkomunikasikan hal-hal yang hendak dilakukan oleh Korea Selatan perihal peningkatan hubungan dengan negara-negara target NSP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Korea Selatan sebagai negara berdaulat menggunakan kebijakan luar negeri dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Peralihan kebijakan dari *Eurasia Initiative* ke *New Southern Policy* berimplikasi pula pada jangkauan & objektif kebijakan yang mencerminkan orientasi Korea Selatan. Hal ini dapat diamati publik melalui aktivitas safari politik Presiden Moon Jae-in ke negara-negara ASEAN dan India.

New Southern Policy merupakan sebuah paradigma kebijakan baru dan inti dari prakarsa diplomasi Korea Selatan yang bertujuan meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dengan negara anggota ASEAN dan India di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga ke level di mana Korea Selatan menjaga hubungan erat dengan empat kekuatan utama (Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan Tiongkok) (Presidential Committee on New Southern Policy 2019).

Melalui perilisan NSP ini pula, timbul pertanyaan mengenai urgensi apa yang menyebabkan Korea Selatan mengambil keputusan ini. Faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya diungkap dibantu dengan teori *decision-making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin. Teori ini mendedahkan tiga determinan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri oleh suatu negara, yaitu determinan politik dalam negeri, determinan konteks internasional, dan determinan kondisi militer & ekonomi.

Selanjutnya, penulis menemukan bahwasannya determinan politik dalam negeri didorong oleh pemengaruh partai melalui narasi kampanye DP pada pilpres 2017 dan penelusuran dukungan elektoral yang dimiliki, pemengaruh massa

melalui opini publik terhadap negara-negara mitra Korea Selatan dan popularitas kinerja kabinet presiden, dan pemengaruh kepentingan melalui KCCI dengan strategi mempertahankan daya saing kelompok usahawan Korea Selatan dihadapan peluang & perubahan lanskap kompetisi. Terakhir, kelompok birokrat menjadi penyusun sekaligus pelaksana kehendak pimpinan Korea Selatan dalam mengumpulkan, menyebarluaskan, hingga menerima Kembali respons atas ide mengenai pendalaman kerja sama dengan negara-negara target.

Pada determinan konteks internasional, *setting* ekologis yang terdiri atas narasi Indo-Pasifik, konflik di Semenanjung Korea, hingga postur aliansi militer Korea Selatan dengan AS yang menjadi instrumen mencapai kepentingan yang kompleks. Antara ketiganya berkelindan dalam menjelaskan aktivitas-aktivitas negara lain yang memengaruhi pengambilan keputusan Korea Selatan sebagaimana narasi Indo-Pasifik memunculkan usaha pembendungan terhadap Tiongkok, tetapi Korea Selatan sedang menghadapi friksi regional karena instalasi THAAD yang diprakarsai oleh keterikatan aliansi Korea Selatan AS direspons kontra-produktif oleh rekan dagang terbesarnya, Tiongkok, karena dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Selain itu, arus manusia yang tumbuh positif antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India pula menjadi impuls dalam mengelola momentum ekonomis untuk membantu mencapai kepentingan nasional Korea Selatan di tengah sempitnya ruang gerak akibat dilematis menanggapi abstraksi membendung Tiongkok, menyelesaikan isu keamanan dengan Tiongkok, sekaligus mencapai usaha diversifikasi agar terlepas dari ketergantungan dengan Tiongkok.

Terakhir pada determinan ini, pola interaksi rutin para pejabat antar-pemerintah yang mencitrakan Korea Selatan sebagai mitra yang memprioritaskan pendalaman kerja sama dengan negara-negara target kebijakan. Hal ini pula disifatkan sebagai konstruktif dan berdampak pada minimalisasi narasi kontra-produktif dari negara target.

Determinan kondisi militer & ekonomi pula memengaruhi pengambilan keputusan karena aktivitas ekonomi Korea Selatan yang besar diikuti oleh bayang-bayang ketergantungan atas Tiongkok, tetapi juga memiliki potensi perluasan pasar ke area ASEAN dan India yang atraktif secara bersamaan. Pada kondisi militer, aliansi militer historis Korea Selatan dengan AS menjadi signifikan dari adanya ketimpangan kekuatan militer dengan Korea Utara yang diperumit dengan aktivitas-aktivitas agresifnya.

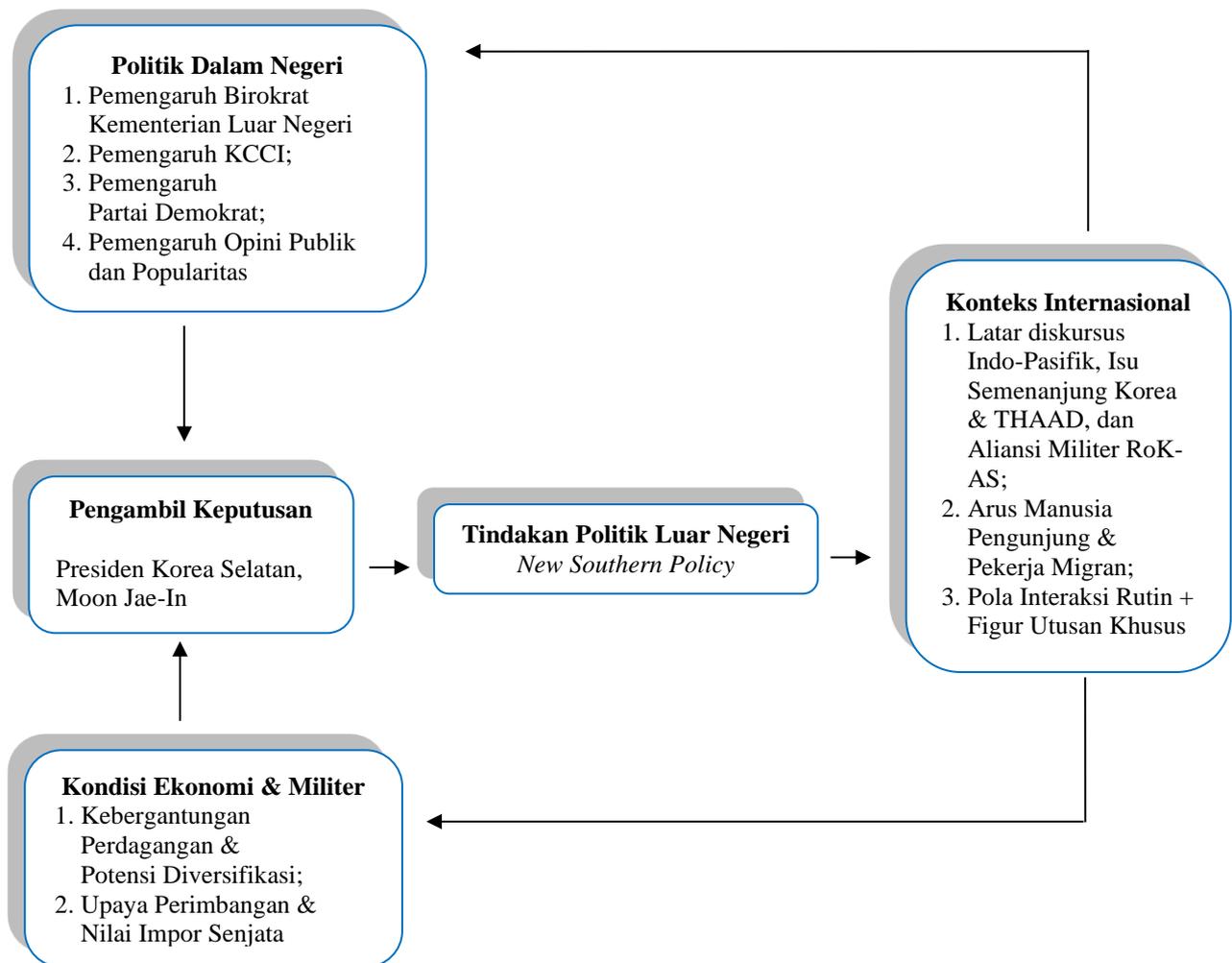
Selain itu, besaran impor senjata asal menjadikan penurunan popularitas AS sebagai rekan Korea Selatan berada pada sisi lain yang harus dipertimbangkan dengan hat-hati. Usaha-usaha untuk mendiversifikasi rekan dagang menuju negara-negara target tidak dapat mengabaikan nilai strategis aliansi tradisional karena usaha mencapai kemandirian dihadapkan dengan realita ketidakamanan.

Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan *New Southern Policy* oleh Korea Selatan dapat dijelaskan melalui tiga determinan teori *decision-making*, yaitu determinan politik dalam negeri, determinan konteks internasional, dan determinan kondisi ekonomi & militer. Ketiga determinan tersebut pun dapat saling bertautan sebagaimana masing-masing subdeterminannya dapat membantu menjelaskan subdeterminan lainnya. Determinan satu dengan yang lainnya secara koheren menjelaskan kebutuhan Korea Selatan dalam

merespons tuntutan domestik, perkembangan keadaan internasional, dan menjaga kepentingan nasionalnya yang kompleks dan dinamis melalui reorientasi kebijakan luar negeri ke ASEAN dan India menggunakan instrumen *New Southern Policy*.

Berikut penulis tampilkan pada diagram 4 mengenai determinan-determinan yang memengaruhi pengambilan keputusan *New Southern Policy* oleh Korea Selatan

Diagram 4. Faktor-Faktor Pemengaruh Pengambilan Keputusan NSP



5.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memandang kebijakan luar negeri & aktivitas antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India akan terus berlanjut sehingga masih ada beberapa penelitian yang dapat dilakukan, seperti:

1. penelitian mengenai pengambilan keputusan atas NSP menggunakan teori yang berbeda, pilihan teori lain dengan kemungkinan judul “Perumusan *New Southern Policy* Berdasarkan *Rational Choice Theory*”. Hal ini menjadi atraktif karena kemungkinan muncul opsi-opsi kebijakan lain sebagai pilihan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada linimasa yang sama;
2. penelitian mengenai peran idiosentrik Moon Jae-in juga menarik untuk dilakukan sehingga kemungkinan judulnya “Aspek Idiosentrik Moon Jae-in dalam Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan 2017-2022” karena besarnya kuasa presiden di Korea Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Meizaro Tifira, and Nuraeni. 2023. "Analisis Kebijakan Luar Negeri India Dalam Act East Policy." *Padjadjaran Journal of International Relations* 5 (1). <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/44697/19203>.
- Arirang TV. 2017. "[Upfront] Episode 159 - Reducing Economic Dependence on China." South Korea. <https://www.youtube.com/watch?v=UWJXfpJuaL0>.
- ASEAN-Korea Cooperation Fund. n.d. "Status of ASEAN-Republic of Korea Cooperation Fund." Accessed April 6, 2023. <https://www.aseanrofund.com/our-works-data-detail>.
- Barbara Kratiuk, Jeroen J J Van den Bosch, Aleksandra Jaskólska, and Yoichiro Sato. 2023. "Handbook of Indo-Pacific Studies."
- Borowiec, Steven. 2017. "Pyeongtaek: A US Base, Americana in Rural South Korea." *Aljazeera*, March 4, 2017. <https://www.aljazeera.com/features/2017/3/4/pyeongtaek-a-us-base-america-in-rural-south-korea>.
- Bureau of Political-Military Affairs. 2023. "U.S. Security Cooperation With ROK." *Department of States of the US*. Department of States of the US. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-korea/>.
- Cabinet Secretariat of Indonesia. 2017. "President Jokowi Receives South Korean Special Envoy Read More: <https://Setkab.Go.Id/En/President-Jokowi-Receives-South-Korean-Special-Envoy/>." *Cabinet Secretariat of Indonesia*, 2017. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-receives-south-korean-special-envoy/>.

- Clinton, Hillary. 2011. "Foreign Policy: America's Pacific Century." *NPR*, October 13, 2011. <https://www.npr.org/2011/10/13/141311902/foreign-policy-americas-pacific-century>.
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*. 2nd ed. Sinar Baru Algensindo.
- Democratic Party of Korea. 2017. "19th Presidential Election Policy Pledge - Democratic Party of Korea." http://manifesto.or.kr/manifesto_data/20170501/01.theminjoo.zip.
- Duchatel, Mathieu, and Phillip Schell. 2013. "China's Policy on North Korea: Economic Engagement and Nuclear Disarmament." *SIPRI Policy Paper 40*. <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRI40.pdf>.
- Gallup Korea Research Institute. 2017a. "Daily Opinion No. 272 - Evaluation by Field on the 100th Day of the President's Inauguration." <https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=854>.
- . 2017b. "Daily Opinion No. 282 - Evaluation by Sector 6 Months after Inauguration of the President." <https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=873>.
- . 2017c. "Daily Opinion No. 284 - Relations with Neighboring Countries, Favorability of the Summit." <https://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=875>.
- Government of South Korea. 2014. "CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY ACT." Korea Legislation Research Institute. 2014. https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=31978&type=new&key=.

- Han, Minjeong, Kim J. James, and Lee John J. 2017. "The 19th Presidential Election: Result and Turnout."
- Indraswari, Ratih. 2022. "South Korea's ASEAN Policy Today: The New Southern Policy and Its Standing." <https://doi.org/10.48770/ker.2022.no2.12>.
- Institute of Security & Development Policy. 2017. "THAAD on the Korean Peninsula." www.IsDp.eu.
- International Monetary Fund. 2023. "IMF Data Mapper." International Monetary Fund. 2023.
<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/KOR>.
- Investopedia. 2023. "Gross National Income (GNI) Definition, With Real-World Example." Investopedia. April 2023.
<https://www.investopedia.com/terms/g/gross-national-income-gni.asp#:~:text=GNI%20is%20the%20total%20income,country%20or%20is%20spent%20abroad>.
- Jobst, Nina. 2024. "Share of Imports and Export in Gross National Income (GNI) in South Korea from 2009 to 2018." Statista. January 23, 2024.
<https://www.statista.com/statistics/642175/south-korea-foreign-trade-share/>.
- Kim, J James, and Hong Sanghwa. 2020. "Asan Institute for Policy Studies Moon's Foreign Policy Priorities in Words and Deeds."
<https://about.jstor.org/terms>.
- Kim, Jiyeon. 2018. "Public Opinion and Presidential Power in South Korea."
<https://www.jstor.org/stable/resrep21430>.
- Kim, Jiyeon, John J. Lee, and Chungku Kang. 2017. "Changing Tides: THAAD and Shifting Korean Public Opinion toward the United States and China."

- Korea Chamber of Commerce and Industry. 2015. "Changes in the Chinese Economy and the Response Tasks of Small and Medium-Sized Businesses." Korea Chamber of Commerce and Industry. October 15, 2015. https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?SEQ_NO_C010=20120930210&CHAM_CD=B001.
- . 2017a. "The Main Axis of the World Economy Changes from G7 to E7." Korea Chamber of Commerce and Industry. February 16, 2017. https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/InfoDetail.asp?SEQ_NO_C050=81.
- . 2017b. "Break through Strong Protectionism through 'ASEAN.'" Korea Chamber of Commerce and Industry. June 2, 2017. https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/InfoDetail.asp?SEQ_NO_C050=881.
- . 2017c. "India Has Become a Blue Ocean in the Global Retail Market." Korea Chamber of Commerce and Industry. October 12, 2017. https://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/InfoDetail.asp?SEQ_NO_C050=2281.
- . n.d. "Introduction to the Institution." Korea Chamber of Commerce and Industry. Accessed October 28, 2023. <https://www.korcham.net/nCham/Service/Kcci/appl/Ci.asp>.
- Korea Customs Service. n.d. "Trade Statistics for Export/Import." Trade Statistics . Accessed July 15, 2023. https://unipass.customs.go.kr/ets/index_eng.do.
- Korean Statistical Information Service. n.d. "Statistical Database." Korean Statistical Information Service . Accessed October 8, 2023.

- Lee, Ji-Young. 2020. "The Geopolitics of South Korea-China Relations: Implications for U.S. Policy in the Indo-Pacific."
- Lee, Joyce. 2017. "China Halts Construction at Major Lotte Project amid THAAD Tension." *Reuters*, February 2017. <https://www.reuters.com/article/lotte-group-china-idUSL4N1FS5RH>.
- Lee, Nae-Young. 2014. "97 Vision and Policy Direction of the Park Geun-Hye Administration and Its East Asia Diplomacy." *The Gakushuin Journal of International Studies* 1.
- Lee, Sang-Hyun. 2014. "The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI): A Vision toward Sustainable Peace and Cooperation in Northeast Asia." The Asan Forum. December 15, 2014. <https://theasanforum.org/the-northeast-asia-peace-and-cooperation-initiative-napci-a-vision-toward-sustainable-peace-and-cooperation-in-northeast-asia/>.
- Lee, Sook-Jong. 2005. "DEMOCRATIZATION AND POLARIZATION IN KOREAN SOCIETY." *Asian Perspective*. Vol. 29. <https://about.jstor.org/terms>.
- McCurry, Justin. 2017. "Park Geun-Hye: South Korean Court Removes President over Scandal." *The Guardian*, March 10, 2017. <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/10/south-korea-president-park-geun-hye-constitutional-court-impeachment>.
- McCurry, Justin, and Michael Safi. 2016. "North Korea Claims Successful Hydrogen Bomb Test in 'Self-Defence against US.'" *The Guardian*, June 6, 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/jan/06/north-korean-nuclear-test-suspected-as-artificial-earthquake-detected>.

- Ministry of Employment and Labor of South Korea. n.d. “Perkenalan Sistem Izin Bekerja.” Employment Permit System. Accessed November 22, 2023.
https://www.eps.go.kr/eo/IntrdEmplrm.eo?pgID=P_000000043&menuID=10005&langCD=in.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2016. “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI).”
https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html.
- Ministry of Foreign Affairs of South Korea. 2017a. “Deputy Minister for Political Affairs Lee Jeong-Kyu and Ambassadors of ASEAN Countries in ROK Discuss Ways to Upgrade ROK-ASEAN Relations.”
https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=318663&page=13.
- . 2017b. “Foreign Minister Meets with Former National Security Advisor of India Shivshankar Menon, Called ‘India’s Kissinger.’”
https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=318734&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=111&titleNm=.
- . 2017c. “Foreign Minister Meets with Ambassadors to ROK from Ten ASEAN Countries.”
https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=318853&page=12.
- . 2017d. “ROK and ASEAN Agree to Elevate Strategic Partnership to Higher Level and Pursue People-Centered Diplomacy (Outcome of ASEAN-

ROK Ministerial Meeting.”

https://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=318874&page=12.

———. n.d. “EurAsia Initiative.” www.mofa.go.kr.

Ministry of National Defense of South Korea. 2012. “Defense White Paper 2012.”

———. 2014. “Defense White Paper 2014.”

———. 2016. “Defense White Paper 2016.”

National Geography Information Institute. 2019a. “Executive Government Chapter, National Atlas of South Korea 2019.”

———. 2019b. “National Assembly Chapter, National Atlas of South Korea 2019.”

Nuechterlein, Donald E. 1976. “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making.” *British Journal of International Studies* 2 (3).

Office for Government Policy Coordination. n.d. “Executive Branch.” Office for Government Policy Coordination, Prime Minister’s Secretariat. Accessed October 2, 2023. <https://www.opm.go.kr/en/government/branch.do>.

Ok, Hyun-ju. 2018. “New Southern Policy at Heart of Moon’s Diplomatic Diversification.” *The Korea Herald*, December 17, 2018.

<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181217000790>.

Palmer, Glenn, and T. Clifton Morgan. 2006. “A THEORY OF FOREIGN POLICY.”

Park, Soyen. 2018. “South Korea’s ‘New Southern Policy’ Reaches the Shores of India.” *The Diplomat*. 2018. <https://thediplomat.com/2018/07/south-koreas-new-southern-policy-reaches-the-shores-of-india/>.

- Presidential Committee on New Southern Policy. 2019. "New Southern Policy Information Booklet." *Publication*. Presidential Committee on New Southern Policy. https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2020/02/Republic_of_Korea-New_Southern_Policy_Information_Booklet.pdf.
- Qin, Amy, and Sang-hun. 2016. "South Korean Missile Defense Deal Appears to Sour China's Taste for K-Pop." *The New York Times*, 2016. <https://www.nytimes.com/2016/08/08/world/asia/china-korea-thaad.html>.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. "Penelitian Kualitatif." *Equilibrium* 5 (9). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.
- Reals, Tucker. 2017. "Why THAAD Is Controversial in South Korea, China and Russia," May 2, 2017. <https://www.cbsnews.com/news/why-thaad-is-controversial-in-south-korea-china-and-russia/>.
- Reuters. 2017a. "South Korea's Lotte Approves Land Swap for Missile Defence: Ministry." *Reuters*, February 27, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-thaad-lotte-idUSKBN1660P6>.
- . 2017b. "South Korean Stocks Fall on Fears of Chinese Tourism Ban." *VoA*, March 2017. <https://www.voanews.com/a/south-korean-stocks-chinese-anger-thaad/3748022.html>.
- Rugy, Veronique de. 2016. "United States Is the World's Leader in International Arms Sales." Mercatus Center. June 28, 2016. <https://www.mercatus.org/research/data-visualizations/united-states-worlds-leader-international-arms-sales>.

Snyder, Scott A. 2018. "Revising South Korea's Constitution."

<https://www.jstor.org/stable/resrep21430.7>.

Son, Ji-eun. 2017. "Moon Unveils New Southern Policy to Boost Ties with ASEAN." *Asia Today*, November 10, 2017.

<https://en.asiatoday.co.kr/view.php?key=20171109001959568>.

Statistics Korea. 2012. "2012 Foreign Labour Force Survey."

<https://kostat.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=f3f6b5750a66c9ff14f6bf2eba22d750262ede84de175b47ea073796e76786db&rs=/synap/preview/board/11733/>

———. 2013. "2013 Foreigner Labour Force Survey."

<https://kostat.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=68bf7183894d9a52d4616f4d9a2bef98205abcc168fa8d08a21222d3d1c71088&rs=/synap/preview/board/11733/>.

———. 2014. "2014 Foreigner Labour Statistics."

<https://kostat.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=b6041c5b76b325a4d49e1694b271406bc7d4feed1aa34f146ba6211542d0604c&rs=/synap/preview/board/11733/>.

———. 2015. "2015 Foreigner Labour Force Survey."

<https://kostat.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=5760c86a7302d50df132ed43bf7231078695e2f640fd6a802329c81fc8b46780&rs=/synap/preview/board/11733/>.

———. 2016. "2016 Foreigner Labour Force Survey."

<https://kostat.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=ecb4137a3b946f1fb0afa925ae64>

86dc6128b606807d6a10933600af6fd28452&rs=/synap/preview/board/11733
/.

The Government of the United States of America. n.d. “Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Korea Agreement.” *United States Force in Korea* . United States Force in Korea . Accessed October 4, 2023. <https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/411%20CSB/1%20U.S.-ROK%20SOFA.PDF>.

The Korea Herald. 2017. “Moon to Send Special Envoy to India, Australia.” *The Korea Herald*, June 2017.
<https://m.koreaherald.com/amp/view.php?ud=20170614000782>.

The Observatory of Economic Complexity. n.d. “Where Does South Korea Import Weapons from? (2011-2016).” The Observatory of Economic Complexity. Accessed October 18, 2023.
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs96/import/kor/show/19/2011.2012.2013.2014.2015.2016/.

The World Bank. 2023. “DataBank.” The World Bank. September 2023.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?end=2017&locations=KR&start=2011>.

Tishehyar, Mandana, and Mojtaba Tuyserkani. 2020. “Central Asia between the South Korean Eurasia Initiative and the China Belt and Road Initiative.” Institute for Political and International Studies. June 18, 2020.
<https://www.ipis.ir/en/subjectview/604244/central-asia-between-the-south-korean-eurasia-initiative-and-the-china-belt-and-road-initiative>.

- Ujvari, Balasz. 2017. "The Belt and Road Initiative – the ASEAN Perspective."
<https://www.egmontinstitute.be/app/uploads/2019/03/SPB107.pdf?type=pdf>.
- United Nations Security Council. 2016. "S/RES/2270 (2016)."
<https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2270-%282016%29>.
- Wongi, Choe. 2019. "Why South Korea Wants to Tie In with ASEAN." *ASEAN Focus*, no. 6 (December).
- Yonhap News Agency. 2017a. "Lotte Facing Huge Loss in China over THAAD Retaliation." *Yonhap News Agency*, May 2017.
<https://en.yna.co.kr/view/AEN20170505002151320>.
- . 2017b. "Moon Names Seoul Mayor Park Special Envoy to ASEAN." *Yonhap News Agency*, May 2017.
<https://en.yna.co.kr/view/AEN20170519010600315>.
- Yoon, Ja-young. 2017. "China Bans Imports of 19 Korean Cosmetics." *The Korean Times*, January 2017.
https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2023/09/602_221794.html.